

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL DAN
DAMPAKNYA TERHADAP ANGKA PENGANGGURAN
DI KABUPATEN KONAWE



Berdasarkan SPK: 074/02/SPK/Balitbang/VI/2023

OLEH:

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
KONAWE BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HALU OLEO

OKTOBER 2023

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN KERJASAMA**

1. Judul : **ANALISIS PENERAPAN TENAGA KERJA
SEKTORAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP
ANGKA PENGANGGURAN DI KABUPATEN
KONawe**

2. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama : Bakri Yusuf, S.Sos, M.Si
 - b. NIP : 197011081996031002
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor/Penata TK I, III/D
 - d. Program Studi : Sosiologi
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Hahu Oleo
 - f. Bidang Keahlian : Sosiologi
3. Anggota Tim Pengusul
- a. Nama Anggota I/Keahlian : Saidin, S.IP, M.Si / Ilmu Komunikasi
 - b. Nama Anggota II/Keahlian : Farauz, S.Sos, M.Hum /Kajian Budaya
 - c. Nama Anggota III/Keahlian : Ghery Satira Fahrur, SST, Sp.PSM /Ilmu Kesos
 - d. Nama Anggota IV/Keahlian : Akbar Wahbi, S.Pd, M.A /Ilmu Administrasi

- 4. Mitra Kerjasama : Balitbang Kabupaten Konawe
- 5. Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 (Empat Bulan)
- 6. Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
- 7. Sumber Dana : APBD Kabupaten Konawe Tahun 2023

Penanggung Jawab,
Ketua LPPM UHO,

Dr. H. Ha Aba, S.Si, M.Si
NIP. 196912311997031011

Kendari,
Oktober 2023

Bakri Yusuf, S.Sos, M.Si
NIP. 197011081996031002

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dengan selesainya Penelitian Kerjasama Swakelola antara LPM Universitas Halu Oleo dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe yang berjudul "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral dan Dampaknya Terhadap Angka Pengangguran di Kabupaten Konawe.

Penelitian "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral dan Dampaknya Terhadap Angka Pengangguran di Kabupaten Konawe"; bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pasar tenaga kerja dan berkontribusi dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah pengangguran.

Selanjutnya, mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan sektor-sektor yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang rendah. Ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana berbagai sektor berkontribusi dalam

menciptakan lapangan kerja, khususnya di Kabupaten Konawe.

Semoga seluruh informasi dan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait dan para pemangku kepentingan dalam penyerapan tenaga kerja dan upaya mengeliminir angka pengangguran di Kabupaten Konawe.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Peneliti dan LPM Universitas Halu Oleo, atas kesediaan bekerjasama. Semoga Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mendukung program pembangunan, memperluas angkatan dan lapangan kerja di Kabupaten Konawe. Terima kasih.

Unaha, Oktober 2023

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Konawe,

Hj. Riny Andriani, SP, M.Si

NIP. 197911192010012013

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Tuhan YME, berkat

rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Penelitian

Kerjasama, dengan berjudul "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja

Sektoral dan Dampaknya Terhadap Angka Pengangguran di

Kabupaten Konawe". Atas selesainya penelitian ini, kami mengucapkan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah

membantu proses penelitian, mulai dari tahap pengajuan judul, koordinasi

kerjasama, penandatangan kontrak, penyusunan instrumen, sosialisasi,

pengumpulan data, analisis data, pembuatan laporan, dan diseminasi

hasil, sebagai berikut:

1. Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe,
atas kerjasama, rekomendasi dan fasilitas sehingga penelitian ini
dapat dilaksanakan.

2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(LPPM) Universitas Halu Oleo, yang telah memberi rekomendasi dan

perizinan kepada tim dosen tenaga ahli untuk berkontribusi dalam

penelitian yang bekerjasama dengan Balitbang Kabupaten Konawe.

3. Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, yang telah

aktif memberikan masukan yang konstruktif dalam kebijakan

penyerapan tenaga kerja dan upaya mengatasi pengangguran

Kabupaten Konawe.

4. Para pemangku kepentingan terutama sektor industri pertambangan,
sektor kemaritiman, sektor perkebunan, sektor pertanian, dan sektor

informal perkotaan yang telah memberikan data dan informasi terkait

dengan analisis penyerapan tenaga kerja dan dampaknya terhadap

angka pengangguran di Kabupaten Konawe.

5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu,
seninga penelitian Kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan baik,
sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada.

Akhirnya kami berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Konawe, dalam upaya mendukung program pembangunan di sektor ketenagakerjaan. Terima kasih.

Kendari, Oktober 2023

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	1
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1. Konsep Tenaga Kerja.....	7
2.2. Tenaga Kerja Sektoral.....	10
2.3. Penyerapan Tenaga Kerja.....	Error! Bookmark not defined.
2.5. Pengangguran.....	30
2.6. Dampak Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pengangguran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1. Pendekatan Penelitian.....	43
3.2. Lokasi Penelitian.....	45
3.3. Populasi dan Sampel.....	45
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	45
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6. Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja sektoral di Kabupaten Konawe.....	55
4.3. Dampak dari Penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap angka pengangguran di Kabupaten Konawe	61
BAB V PENUTUP	131
5.1. Kesimpulan	131
5.2. Rekomendasi.....	133
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arah pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan indikator keberhasilan pemerintah yang senantiasa ingin diwujudkan. Demikian halnya Indonesia sebagai negara yang terus berbenah diri melalui pembangunan nasional pada hakikatnya memiliki arah pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Konteks pembangunan nasional adalah merupakan proses pengintegrasian berbagai variabel dengan mendinamisasi berbagai komponen antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya menghasilkan wujud nyata pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu permasalahan krusial dalam proses pembangunan yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang adalah permasalahan ketenagakerjaan, antara lain daya serap tenaga kerja sektoral hingga permasalahan angka pengangguran yang masih terus menjadi beban dari pembangunan sosial ekonomi bangsa yang hingga sekarang belum bisa terselesaikan secara signifikan

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa tercatat 135,61 juta penduduk Indonesia yang bekerja pada per Februari 2022, dengan pesebaran pada sektor-sektor secara bervariasi. Sektor pertanian masih berada pada sektor yang mayoritas dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar

29,96 %, kemudian sektor perdagangan (19,03 %), selanjutnya sektor industri (13,77 %), akomodasi dan makanan-minuman (7,11 %), lapangan usaha konstruksi (6,04 %), sektor jasa Pendidikan (4,89 %), jasa lainnya (4,34 %), sektor transportasi dan pergudangan (4,21 %), sektor administrasi pemerintahan (3,42 %), Kesehatan (1,76 %), jasa perusahaan (1,43 %), pertambangan (1,17 %), dan jasa keuangan (1,11 %), serta sektor pengadaan listrik dan gas (0,23 %)

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. (Kuncoro; 2002).

Mengapa penyerapan tenaga kerja sangat penting? Karena pada dasarnya penyerapan tenaga kerja diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Penyerapan tenaga kerja terdiri dari adanya tenaga kerja dan peluang kesempatan kerja. Penyerapan tenaga kerja adalah salah satu faktor penunjang berlangsungnya pembangunan ekonomi dan pembangunan industri.

Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh tingkat pengangguran yang semakin menurun. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya maka semakin rendah tingkat pengangguran dan semakin tinggi tingkat penyerapan tenaga kerja. Angka pengangguran bagi suatu negara termasuk Indonesia adalah sebuah problem serius, karena pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat akan menjadi

rendah yang pada gilirannya menimbulkan kemiskinan dengan tingkat kemapanan hidup yang tidak layak serta masalah-masalah sosial yang rentan dengan kriminalitas dan moralitas. Di negara berkembang kerap dilanda angka pengangguran yang besar akibat dari besarnya jumlah penduduk usia kerja yang tidak sepadan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Sempitnya lapangan pekerjaan dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain kelangkaan modal investasi, banyaknya penduduk usia kerja, dan munculnya masalah-masalah sosial politik yang melanda negara tersebut. Sedangkan bagi negara maju masalah pengangguran berkaitan dengan pasang surutnya siklus bisnis.

Kabupaten Konawe merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terus membenahi diri dengan dinamika pembangunan yang terus berjalan pada semua sektor. Penggerak roda pembangunan pada lini sektor-sektor tersebut adalah aktor-aktor pembangunan yang produktif yang disebut dengan tenaga kerja. Peran para tenaga kerja menjadi bagian penting sebagai motor penggerak (*leading sector*) pada sektor dimana mereka berada. Hal ini menandakan bahwa pembangunan di Kabupaten Konawe berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

Namun dibalik itu, masih terdapat angka pengangguran sebagai masalah sosial ekonomi yang perlu mendapat perhatian secara serius agar tidak menjadi "beban pembangunan" itu sendiri. Menurut data BPS, kondisi pengangguran di Kabupaten Konawe ditandai dengan peningkatan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2012 ke tahun 2015, kemudian pada 2017

menurun drastis dan meningkat perlahan hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Konawe sebesar 5,42 persen, sementara pada tahun 2021 menurun menjadi 4,56 persen atau mengalami penurunan sebanyak 0,86 poin.

Untuk menelisik kondisi tersebut, maka kajian ini akan berupaya mengurai adanya signifikansi antara fluktuasi angka pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja sektoral di Kabupaten Konawe.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja sektoral di Kabupaten Konawe
2. Bagaimana dampak dari penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap angka pengangguran di Kabupaten Konawe.

1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral dan Dampaknya Terhadap Angka Pengangguran Di Kabupaten Konawe" adalah:

1. Mengkaji dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja sektoral di Kabupaten Konawe
2. Menghasilkan informasi tentang hubungan yang signifikan (dampak) dari penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap angka pengangguran di Kabupaten Konawe.

2. Sasaran

Sasaran penelitian "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral dan Dampaknya Terhadap Angka Pengangguran Di Kabupaten Konawe" adalah sebagai berikut:

- a. Para Pengambil/penentu kebijakan di bidang ketenagakerjaan, meliputi: Pimpinan Daerah, Bappeda, serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Konawe
- b. Pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan, seperti industriawan, pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM), pelaku UMKM, wirausahawan, pedagang, dan sebagainya.

3. Manfaat

Manfaat penelitian "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral dan Dampaknya Terhadap Angka Pengangguran Di Kabupaten Konawe" adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah daerah terutama instansi terkait (Bappeda, Dinas Tenaga Kerja), hasil penelitian ini akan menjadi informasi dalam memformulasi berbagai perencanaan tenaga kerja serta dampaknya terhadap angka pengangguran di Kabupaten Konawe.
- b. Bagi pengguna tenaga kerja, dapat menjadi sumber informasi dalam penyusunan formasi perencanaan penggunaan tenaga kerja sehingga mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara proporsional dan profesional.

bahwa mereka yang berusia 10 tahun termasuk sebagai kelompok usia kerja. Namun bank dunia juga memiliki batasan usia kerja yaitu antara 15 hingga 64 tahun (Dumairy, 1996).

BPS (2001) merilis bahwa yang tergolong kelompok Angkatan kerja yaitu mereka yang termasuk usia kerja selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja dikarenakan suatu alasan tertentu, contohnya pegawai yang sedang mengambil cuti maupun petani yang menunggu masa panen. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari, berusaha maupun yang sedang mengharapkan pekerjaan juga yang tergolong kedalam kelompok angkatan kerja, selain itu yang termasuk bukan golongan angkatan kerja yaitu mereka yang selama satu minggu yang lalu memiliki kegiatan yang bukan termasuk dalam angkatan kerja, contohnya yaitu mereka yang sedang menempuh pendidikan dan yang sedang mengurus rumah tangga.

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian suatu negara. Istilah ini mengacu pada seluruh individu yang tersedia untuk bekerja dalam suatu pasar tenaga kerja. Tenaga kerja ini terdiri dari berbagai jenis pekerjaan dan tingkat keahlian, mulai dari pekerja kasar hingga pekerja yang memiliki keahlian khusus, seperti dokter, insinyur, dan akuntan. Tenaga kerja memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mereka adalah sumber daya manusia yang berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Tenaga kerja yang terampil dan produktif memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara dalam pasar global.

Dalam dunia kerja, tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua kategori utama: tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil. Tenaga kerja terampil biasanya memiliki pendidikan, pelatihan, atau keterampilan khusus yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu, sementara tenaga kerja tidak terampil mungkin bekerja dalam pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dasar atau fisik, seperti pekerja pabrik atau buruh tani.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, perusahaan dan pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan tenaga kerja. Ini melibatkan pengaturan upah minimum, perlindungan tenaga kerja, peraturan kerja, dan kebijakan lain yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja. Di sisi lain, tenaga kerja juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan pekerjaan mereka dengan baik, termasuk menjalani pelatihan jika diperlukan, bekerja dengan etika, dan terlibat dalam pengembangan karir mereka.

Selain itu, aspek demografi juga berperan dalam dinamika tenaga kerja. Perubahan jumlah penduduk, usia penduduk, dan tingkat migrasi dapat memengaruhi ketersediaan dan karakteristik tenaga kerja suatu negara. Oleh karena itu, perencanaan strategis dalam pengelolaan tenaga kerja menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks global, tenaga kerja juga dapat menjadi aset yang berharga jika dikelola dengan baik. Peningkatan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan keterampilan, dapat membantu meningkatkan daya saing tenaga kerja suatu negara dalam skenario globalisasi.

Kesimpulannya, tenaga kerja adalah elemen penting dalam perekonomian suatu negara. Mereka berperan dalam menghasilkan barang dan jasa, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Penting untuk memastikan perlindungan dan pengembangan tenaga kerja agar menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

2.2. Tenaga Kerja Sektoral

Konsep tentang tenaga kerja sektoral mengacu pada pembagian tenaga kerja ke dalam berbagai sektor ekonomi yang berbeda berdasarkan jenis pekerjaan atau industri di mana mereka bekerja. Ini adalah cara untuk mengklasifikasikan tenaga kerja berdasarkan spesialisasi dan peran mereka dalam ekonomi.

Tenaga kerja sektoral mengacu pada pembagian dan pengelompokan pekerjaan atau pekerja ke dalam sektor-sektor ekonomi yang berbeda. Sektor ekonomi ini biasanya dibagi menjadi beberapa kategori utama, seperti sektor pertanian, industri, dan jasa. Pemisahan ini berguna untuk menganalisis dan memahami peran dan kontribusi tenaga kerja dalam perekonomian.

1. **Sektor Pertanian;** Sektoral pertanian mencakup pekerjaan yang terkait dengan produksi makanan, tanaman, dan ternak. Tenaga kerja yang bekerja di sektor ini biasanya terlibat dalam aktivitas seperti bercocok tanam, panen, peternakan, dan perikanan. Sektoral pertanian adalah sektor tradisional yang sering ditemukan di negara-negara agraris.
2. **Sektor Industri;** Sektoral industri mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pengolahan dan produksi barang-barang manufaktur. Ini termasuk pekerjaan di pabrik-pabrik, perakitan produk, dan sektor

konstruksi. Pekerja di sektor industri sering terlibat dalam produksi barang-barang fisik.

3. **Sektor Jasa;** Sektoral jasa mencakup berbagai layanan yang tidak melibatkan produksi fisik barang. Ini termasuk sektor layanan profesional seperti perbankan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, teknologi informasi, dan hiburan. Tenaga kerja di sektor jasa sering kali terlibat dalam memberikan layanan dan mendukung fungsi masyarakat.

Pemahaman tentang tenaga kerja sektoral membantu pemerintah, perusahaan, dan analis ekonomi untuk merinci komposisi tenaga kerja dan kontribusi sektor-sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Hal ini juga memungkinkan pemantauan tren ketenagakerjaan, pembentukan kebijakan ketenagakerjaan, dan perencanaan pengembangan ekonomi.

Penting untuk mengakui bahwa perkembangan ekonomi suatu negara sering kali berkaitan dengan perubahan dalam komposisi tenaga kerja sektoral. Sebagai negara berkembang, sektor-sektor tertentu mungkin mengalami pertumbuhan yang lebih pesat daripada yang lain. Oleh karena itu, konsep tenaga kerja sektoral adalah alat penting dalam menganalisis dan merencanakan perkembangan ekonomi suatu negara dan penerapan kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan sektor-sektor tertentu.

Pembagian jenis pekerjaan sektoral merujuk pada cara mengelompokkan pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi yang dominan dalam aktivitas mereka. Ada tiga sektor ekonomi utama yang digunakan dalam pembagian sektor pekerjaan, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan

sektor tersier. Berikut adalah penjelasan dan uraian secara terperinci tentang masing-masing sektor ekonomi:

1. **Sektor Primer;** Sektoral primer mencakup pekerjaan yang terkait langsung dengan eksploitasi sumber daya alam. Ini termasuk kegiatan seperti pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, dan kehutanan

- Pertanian; Pekerjaan dalam pertanian melibatkan penanaman tanaman, pemeliharaan hewan ternak, dan produksi tanaman pangan dan komoditas pertanian lainnya.
- Perikanan; Ini mencakup aktivitas penangkapan ikan, budidaya ikan, dan pengolahan hasil laut.
- Peternakan; Pekerjaan dalam sektor peternakan mencakup pemeliharaan hewan seperti sapi, kambing, ayam, dan produksi produk hewan seperti daging dan susu.
- Pertambangan; Ini termasuk ekstraksi mineral, logam, dan bahan tambang lainnya.
- Kehutanan; Aktivitas kehutanan mencakup penebangan pohon, produksi kayu, dan perlindungan hutan.

2. **Sektor Sekunder:** Sektoral sekunder melibatkan pekerjaan yang terkait dengan pengolahan dan manufaktur barang-barang mentah menjadi produk jadi. Ini termasuk industri manufaktur, konstruksi, dan produksi energi.

- Industri Manufaktur; meliputi pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang seperti mobil, tekstil, peralatan elektronik, dan produk-produk manufaktur lainnya.

- Konstruksi; Pekerjaan konstruksi melibatkan pembangunan dan perbaikan bangunan, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
- Produksi Energi; mencakup pembangkitan listrik, pengolahan minyak, dan produksi energi lainnya.

3. Sektor Tersier; Sektoral tersier adalah sektor yang melibatkan penyediaan layanan dan tidak langsung terlibat dalam produksi barang fisik. Ini mencakup sektor jasa, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan sektor layanan lainnya.

- Jasa Keuangan; Ini mencakup perbankan, asuransi, investasi, dan layanan keuangan lainnya.
- Pendidikan; Pekerjaan di sektor pendidikan melibatkan guru, dosen, dan staf pendidikan lainnya.
- Kesehatan; mencakup sektor kesehatan, termasuk rumah sakit, dokter, dan perawat.
- Pariwisata; Pekerjaan dalam sektor pariwisata mencakup hotel, restoran, agen perjalanan, dan sektor terkait lainnya.
- Perdagangan; mencakup aktivitas perdagangan seperti ritel, grosir, dan distribusi barang.

Pembagian sektor pekerjaan ini membantu dalam memahami komposisi ekonomi suatu negara dan dapat digunakan untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai. Perubahan dalam struktur sektor pekerjaan juga mencerminkan perkembangan ekonomi suatu negara dari agraris, industri, hingga ekonomi berbasis layanan yang lebih modern.

Pembagian jenis pekerjaan sektoral merujuk pada cara mengelompokkan pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi yang dominan dalam aktivitas mereka. Ada tiga sektor ekonomi utama yang digunakan dalam pembagian sektor pekerjaan, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Berikut adalah beberapa referensi yang membahas topik ini:

Menurut Gatningsih (2017) bahwa sektor primer mencakup pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sektor sekunder mencakup pekerjaan yang berhubungan dengan produksi barang, seperti industri manufaktur dan konstruksi. Sedangkan sektor tersier mencakup pekerjaan yang berhubungan dengan jasa, seperti perdagangan, transportasi, dan keuangan.

Selanjutnya Bahtiar (2019) membahas tentang pengelompokan sektor informal yang dilakukan oleh BPS dan ILO. Sektor informal sering kali dianggap sebagai tiang penyangga perekonomian. Namun, menurut pendapat lain, sektor informal meliputi tindakan-tindakan aktor ekonomi yang gagal untuk menaati peraturan-peraturan kelembagaan yang telah mapan atau terabaikan dari perlindungan mereka.

Pembahasan tentang pekerjaan layak yang merupakan hal utama dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan merupakan cara untuk mencapai pembangunan yang setara, inklusif, dan berkelanjutan. Pekerjaan layak dapat ditemukan di semua sektor ekonomi, baik sektor primer, sekunder, maupun tersier (ILO; 2012)

Membahas tentang proyeksi kebutuhan tenaga kerja menurut sektor dan jabatan tahun 2021-2024. Pada tahun 2021-2024, jumlah kesempatan

kerja di Indonesia diperkirakan bertambah 7.365.011 orang (2.455.004 orang per tahun). Kesempatan kerja tersebut tersebar dalam berbagai jenis pekerjaan atau jabatan, pengelompokan jabatan tersebut dapat ditemukan di semua sektor ekonomi, baik sektor primer, sekunder, maupun tersier.

Dari beberapa referensi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian jenis pekerjaan sektoral merujuk pada cara mengelompokkan pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi yang dominan dalam aktivitas mereka. Ada tiga sektor ekonomi utama yang digunakan dalam pembagian sektor pekerjaan, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Pekerjaan dapat ditemukan di semua sektor ekonomi, baik sektor primer, sekunder, maupun tersier.

Tenaga kerja sektoral di Indonesia mengacu pada pekerjaan yang terbagi ke dalam sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian, industri, jasa, dan sektor-sektor lainnya. Setiap sektor memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam perekonomian Indonesia. Berikut adalah gambaran umum tentang tenaga kerja sektoral di Indonesia:

1. Sektor Pertanian: Sektor pertanian masih menjadi sektor terbesar dalam perekonomian Indonesia, meskipun persentasenya terus menurun seiring dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Pekerjaan di sektor pertanian melibatkan berbagai kegiatan, termasuk budidaya tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sebagian besar pekerja di sektor pertanian adalah petani kecil yang menggarap lahan pertanian mereka sendiri atau bekerja sebagai buruh tani.

2. Sektor Industri: Sektor industri mencakup sektor manufaktur, konstruksi, dan pertambangan. Sektor ini telah mengalami pertumbuhan signifikan, terutama dalam industri manufaktur seperti tekstil, elektronik, dan otomotif. Sektor konstruksi juga telah berkembang pesat, dengan banyak proyek pembangunan infrastruktur dan properti di seluruh negeri. Sektor pertambangan mencakup ekstraksi dan produksi sumber daya alam seperti batu bara, minyak dan gas, serta logam.
3. Sektor Jasa: Sektor jasa mencakup berbagai kegiatan seperti perdagangan, transportasi, keuangan, perhotelan, pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Pekerjaan di sektor jasa mencakup berbagai tingkat kualifikasi, mulai dari pekerja kasual hingga profesional berpendidikan tinggi. Seiring pertumbuhan ekonomi, sektor jasa telah menjadi kontributor penting terhadap PDB Indonesia.
4. Sektor Informal: Di Indonesia, masih ada sejumlah besar pekerja di sektor informal yang tidak diakui secara resmi. Mereka seringkali bekerja di sektor pertanian kecil, pedagang kaki lima, jasa rumah tangga, atau pekerja harian. Pekerja di sektor informal seringkali tidak memiliki akses ke perlindungan sosial atau hak-hak pekerja.
5. Urbanisasi; Seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia mengalami urbanisasi yang cepat. Banyak orang pindah dari pedesaan ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan dan peluang ekonomi. Urbanisasi telah menciptakan tantangan baru dalam hal perumahan, infrastruktur, dan mobilitas tenaga kerja.
6. Skill dan Pendidikan; Investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi

kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan tuntutan pasar kerja, diperlukan peningkatan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja.

Tenaga kerja sektoral di Indonesia mencerminkan keragaman aktivitas ekonomi di negara ini. Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kondisi kerja di berbagai sektor guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja.

2.3. Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam dunia kerja atau khususnya terkait dengan penyerapan tenaga kerja setiap sektor berbeda-beda untuk penyerapan tenaga kerjanya, misalnya saja tenaga kerja di sektor formal. Penyeleksian tenaga kerjanya di butuhkan suatu keahlian khusus, pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk biasa bekerja pada sektor formal. Usaha perluasan lapangan pekerjaan dapat dilakukan untuk menyerap tenaga kerja dengan dua cara :

- 1) Pengembangan industri yaitu jenis industri yang bersifat padat karya yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam industri termasuk industri rumah tangga.
- 2) Melalui berbagai proyek pekerjaan umum, misalnya pembuata jembatan, jalan raya atau bendungan.

Menurut Haryo (2002) penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai

sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar berarti memiliki sumber daya yang besar pula. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berupa tenaga kerja harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tenaga kerja yang ada harus mampu diserap oleh semua kegiatan dan sektor ekonomi. Penyerapan tenaga kerja bisa dikaitkan dengan keseimbangan interaksi antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, yang di mana permintaan tenaga kerja pasar dan penawaran tenaga kerja pasar secara bersama menentukan suatu penggunaan tenaga kerja keseimbangan (Fuad, 2013).

Menurut Sonny Sumarsono permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi, dimana faktor yang mempengaruhi penyerapan akan tenaga kerja adalah:

1. Tingkat Upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi,

mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.

- b. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (*substitution effect*).

2. Nilai Produksi

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang selanjutnya akan dijual atau sampai ke tangan konsumen. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan atau industri meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. Perubahan yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain: naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi.

3. Nilai Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Mesin digerakkan oleh tenaga kerja atau sumber-sumber serta bahan-bahan dikelola oleh manusia. Pembelian barang modal ini merupakan investasi pada waktu yang akan datang. Nilai investasi ini ditetapkan atas dasar nilai atau harga dari kondisi mesin dan peralatan pada saat pembelian. Investasi ini menentukan skala usaha dari suatu industri kecil yang akan mempengaruhi kemampuan dari usaha tersebut dalam penggunaan faktor produksi yang dalam hal ini berhubungan dengan jumlah investasi yang dilakukan perusahaan yang pada akhirnya menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dimana faktor utama untuk menentukan tingkat investasi adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.
- b. Tingkat bunga
- c. Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa akan datang.
- d. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
- e. Keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Dengan demikian besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja. Secara teoritis, semakin besar nilai investasi pada Industri Kecil dimana investasi yang dilakukan bersifat padat karya, sehingga kesempatan kerja yang diciptakan semakin tinggi.

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung

untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan (BPS, 2010). Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada.

Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut memberikan kepuasan kepadanya.

Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pertambahan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja yang seperti itu dinamakan *derived demand* (Simanjuntak, 1985). Pengusaha mempekerjakan seseorang karena membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksi. Di dalam menganalisis mengenai permintaan perlulah disadari perbedaan di antara istilah "permintaan" dan "jumlah barang yang diminta".

Simanjuntak (1985) mendefinisikan yang dimaksud dengan permintaan adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah yang diminta berarti banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu.

Menurut Sudarsono (1988), permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu unit usaha. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, yaitu permintaan pasar akan hasil produksi dari suatu unit usaha, yang tercermindi besarnya volume produksi dan harga barang-barang modal seperti mesin atau alat proses produksi.

Mengacu pada uraian di atas, maka diperoleh kesimpulan adanya perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh sektor usaha tertentu di suatu wilayah. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditujukan pada kuantitas dan banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu. Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor.

Penyerapan tenaga kerja adalah proses di mana suatu perekonomian atau sektor usaha mengakomodasi atau mempekerjakan individu-individu dalam berbagai posisi dan pekerjaan. Proses ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, dari tingkat nasional hingga perusahaan-perusahaan individu.

Penyerapan tenaga kerja adalah elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, kita akan menguraikan lebih lanjut tentang penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Definisi Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah upaya untuk memberikan pekerjaan kepada individu yang mencari pekerjaan, sehingga mereka dapat berkontribusi pada perekonomian dan mencapai penghidupan yang lebih baik.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja

- a. Pertumbuhan Ekonomi; Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah berpengaruh pada kemampuan untuk menyerap tenaga kerja baru.
- b. Investasi dan Pembangunan Infrastruktur; Investasi dalam proyek-proyek pembangunan, seperti infrastruktur dan industri, dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- c. Pendidikan dan Keterampilan; Kemampuan tenaga kerja untuk mengisi pekerjaan yang tersedia sangat tergantung pada pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.
- d. Kebijakan Pemerintah; Kebijakan pemerintah, seperti kebijakan fiskal dan ketenagakerjaan, dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja.
- e. Perubahan Demografis; Perubahan dalam populasi, seperti pertumbuhan penduduk atau perubahan dalam struktur usia, dapat memengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja dapat diukur dengan berbagai cara, termasuk tingkat pengangguran, partisipasi tenaga kerja, dan angkatan kerja. Tingkat pengangguran mencerminkan persentase individu yang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Partisipasi tenaga kerja mengukur sejauh mana angkatan kerja (individu yang berpotensi untuk bekerja) aktif mencari atau memiliki pekerjaan. Angkatan kerja adalah total individu yang bisa bekerja dalam suatu perekonomian atau sektor.

Dampak Positif Penyerapan Tenaga Kerja

- a. Pengurangan Pengangguran; Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran.
- b. Peningkatan Pendapatan; Pekerjaan yang tersedia memberikan individu pendapatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
- c. Peningkatan Konsumsi; Dengan adanya pekerjaan, individu memiliki kemampuan untuk menghabiskan uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tantangan dalam Penyerapan Tenaga Kerja

- a. Kesenjangan Keterampilan; Terdapat kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan permintaan pasar kerja.
- b. Masalah Struktural; Beberapa sektor ekonomi mungkin mengalami penurunan permintaan untuk tenaga kerja, sementara sektor lain mengalami pertumbuhan.
- c. Faktor Demografis; Penuaan penduduk dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja, terutama dalam sektor-sektor tertentu.

Dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penting bagi

pemerintah, perusahaan, dan individu untuk bekerja sama dalam mendukung pelatihan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini akan membantu menciptakan perekonomian yang lebih produktif dan inklusif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.3. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh suatu perusahaan pada tingkat upah tertentu. Pengusaha mempekerjakan individu dengan tujuan untuk membantu produksi barang atau jasa yang akan dijual dan didistribusikan kepada masyarakat. Pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi. Mereka sesungguhnya adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat dan berusaha terlibat dalam proses produksi barang dan jasa (Mulyadi, 2006).

Permintaan tenaga kerja sangat tergantung kepada kondisi perekonomian. Pada saat perekonomian dalam kondisi baik, maka permintaan akan tenaga kerja akan lebih tinggi, sedangkan pada saat perekonomian lesu maka permintaan akan tenaga kerja berkurang dan pasar tenaga kerja akan turut lesu. Pada saat permintaan akan tenaga kerja tinggi, maka tingkat pengangguran akan rendah, sebaliknya jika permintaan rendah, maka tingkat pengangguran akan meningkat.

Permintaan tenaga kerja sangat bergantung pada perekonomian, saat perekonomian dalam kondisi baik maka permintaan tenaga kerja akan lebih tinggi sedangkan pada saat perekonomian lesu maka permintaan akan tenaga kerja juga akan turut lesu. Pada saat permintaan akan tenaga kerja

tinggi maka tingkat pengangguran akan rendah, sebaliknya jika permintaan akan tenaga kerja rendah maka tingkat pengangguran akan tinggi. Secara teoritis dalam Negara yang sedang berkembang bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka permintaan tenaga kerja atau partisipasi rakyat dalam pembangunan akan meningkat pula. Dengan demikian, faktor - faktor yang dapat meningkatkan demand tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi atau jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan atau *demand* dari masyarakat dimana permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan juga tingkat upah.

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah maka semakin besar tenaga kerja yang ditawarkan. Penawaran tenaga kerja sendiri merupakan cerminan dari jumlah tenaga kerja yang mau dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu dengan mendapat suatu balas-karya (upah atau gaji, berupa uang atau berupa barang). Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja adalah jumlah penduduk, struktur umur, produktivitas, tingkat upah, tingkat pendapatan, kebijakan pemerintah, wanita yang mengurus rumah tangga, penduduk yang bersekolah, kondisi perekonomian.

Permintaan dan penawaran tenaga kerja adalah konsep ekonomi yang

penting dalam pasar tenaga kerja. Ini adalah cara di mana pekerja dan majikan berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan dalam tingkat upah dan jumlah pekerja yang tersedia. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai kedua konsep ini:

1. Permintaan Tenaga Kerja:

Permintaan tenaga kerja merujuk pada jumlah pekerjaan atau pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau majikan. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan tenaga kerja antara lain:

- **Pertumbuhan ekonomi:** Ketika perekonomian tumbuh, perusahaan cenderung membutuhkan lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat.
- **Investasi perusahaan:** Perusahaan yang mengalokasikan lebih banyak dana untuk ekspansi dan pengembangan juga akan membutuhkan lebih banyak pekerja.
- **Teknologi:** Penggunaan teknologi baru dapat memengaruhi permintaan tenaga kerja. Seiring dengan otomatisasi, beberapa pekerjaan mungkin berkurang, sementara pekerjaan di sektor teknologi mungkin meningkat.
- **Perubahan demografi:** Perubahan dalam komposisi penduduk, seperti peningkatan usia pensiun, juga dapat memengaruhi permintaan tenaga kerja.

2. Penawaran Tenaga Kerja:

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah pekerja yang siap bekerja pada tingkat upah tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi

penawaran tenaga kerja termasuk:

- Jumlah penduduk: Jumlah orang yang tersedia untuk bekerja dalam suatu wilayah sangat memengaruhi penawaran tenaga kerja.
- Pendidikan dan pelatihan: Tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja juga berdampak pada penawaran tenaga kerja. Pekerja dengan keterampilan yang relevan cenderung memiliki penawaran tenaga kerja yang lebih besar.
- Tingkat upah: Upah yang ditawarkan oleh pasar kerja akan memengaruhi sejauh mana individu bersedia untuk bekerja. Upah yang lebih tinggi cenderung meningkatkan penawaran tenaga kerja.

Keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja tercapai pada tingkat upah di mana jumlah pekerja yang tersedia sesuai dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Jika permintaan melebihi penawaran, maka upah cenderung meningkat. Sebaliknya, jika penawaran lebih besar dari permintaan, maka upah cenderung menurun.

Perubahan dalam faktor-faktor ekonomi dan sosial dapat menyebabkan pergeseran dalam kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang dinamika ini penting untuk kebijakan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan perencanaan karir individu.

Penyerapan tenaga kerja sektoral di Indonesia dapat berubah seiring waktu karena faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, perubahan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Namun, berikut

adalah gambaran umum tentang penyerapan tenaga kerja di beberapa sektor utama di Indonesia:

1. Pertanian:

- Sektor pertanian masih menjadi salah satu penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia, terutama di daerah pedesaan.
- Tenaga kerja pertanian biasanya terdiri dari petani, buruh tani, dan peternak.
- Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian cenderung menurun seiring dengan pertumbuhan sektor lain, seperti manufaktur dan jasa.

2. Manufaktur:

- Sektor manufaktur telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
- Berbagai jenis industri manufaktur, seperti tekstil, elektronik, otomotif, dan makanan, telah menyerap banyak tenaga kerja.
- Seiring dengan peningkatan teknologi, terjadi peningkatan produktivitas sehingga sektor manufaktur lebih efisien dalam menggunakan tenaga kerja.

3. Jasa:

- Sektor jasa, termasuk perdagangan, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, telah menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
- Penyerapan tenaga kerja di sektor jasa sering berkaitan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso. 2004). Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil (Tohar. 2000).

- b. Teori Keynes; Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat

menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

- c. Teori Kependudukan dari Malthus; Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Dalam dia punya esai yang orisinal, Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk yang cukup kaku. Dia mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara "deret ukur" (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara "deret hitung" (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya). Dalam karyanya yang terbit belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula, hanya saja dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua uraian tersebut Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia akan terjerumus ke dalam kemiskinan kelaparan. Dalam jangka panjang tidak ada kemajuann teknologi yang mampu mengalihkan keadaan karena kenaikan supply makanan terbatas sedangkan "pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia". Apabila ditelaah lebih dalam teori Malthus ini yang menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas

persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

- d. Teori Sosiologi Ekonomi No-Marxian; Berawal dari analisis Marx pada awal abad 20 tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif. Industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan pasar. Namun Marx yakin pada suatu saat apabila kapitalisme sudah muncul dengan demikian pesatnya maka akan memunculkan kompetisi antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat dalam persaingan tersebut. Dengan munculnya monopoli modal ini maka akan ada satu perusahaan besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam perekonomian kapitalis. Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para penganut Marxian yang baru ini konsep "kelas buruh " tidak mendeskripsikan sekelompok orang atau sekelompok pekerjaan tertentu, tetapi lebih merupakan pembelian dan penjualan tenaga

kerja. Para tenaga kerja tidak mempunyai alat produksi sama sekali sehingga segolongan orang terpaksa menjual tenaga mereka kepada sebagian kecil orang yang mempunyai alat produksi. Dari uraian diatas maka dapat kita telaah lagi bahwa dengan adanya pergantian antara sistem kapitalis kompetitif menjadi kearah sistem kapitalis monopoli, maka akan terdapat sebagian perusahaan yang masih tidak mampu bersaing dan menjadi terpuruk. Apabila semua proses produksi dan pemasaran semua terpengaruh oleh sebuah perusahaan raksasa saja, maka akan mengakibatkan perusahaan kecil menjadi sangat sulit dan hal pemasaran, bisa saja perusahaan kecil tersebut mengalami kebangkrutan dan tidak lagi mampu menggaji pekerjanya. Setelah perusahaan tersebut tidak mampu beroperasi lagi, maka para pekerja yang semula bekerja dalam perusahaan tersebut menjadi tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian akhirnya pekerja tersebut menjadi pengangguran.

Pengangguran (tunakarya) ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan

dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Fator utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Navarrete menjelaskan dalam bukunya "Underemployment in Underdeveloped Countries" pengangguran dapat dilukiskan sebagai suatu keadaan dimana adanya pengalihan sejumlah faktor tenaga kerja ke bidang lain yang mana tidak akan mengurangi output keseluruhan sektor asalnya atau dikatakan bahwa produktivitas marginal unit-unit faktor tenaga tempat asal mereka bekerja adalah nol atau hampir mendekati nol atau juga negatif Jhingan (2014).

Definisi pengangguran menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pengangguran terbuka (*openunemployment*) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari perkerjaan, baik yang mencari perkerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Sedang pekerja yang

digolongkan setengah penganggur (*underemployment*) adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah. Setengah pengangguran sukarela adalah setengah penganggur tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Setengah penganggur terpaksa adalah setengah menganggur yang masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan. Pekerja digolongkan setengah penganggur parah (*severe underemployment*) apabila ia masuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam seminggu.

Menurut Sukirno (2008), pengangguran biasanya dibedakan atas empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran normal yang terjadi jika ada 23% maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik;
2. Pengangguran siklikal yaitu pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja;
3. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan;
4. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri.

Sedangkan bentuk-bentuk pengangguran berdasarkan cirinya dapat

digolongkan sebagai berikut:

1. Pengangguran Musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim, misalnya orang-orang yang bekerja sebagai petani sawah mereka akan bekerja selama musim panen setelah itu mereka menganggur menunggu musim berikutnya. Begitupun misalnya dengan nelayan.
2. Pengangguran Terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan.
3. Pengangguran Tersembunyi adalah pengangguran yang pada orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah. entah itu karena ketidak sesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan ataupun lainnya. Pengangguran jenis ini menyebabkan produktivitas kerja yang rendah.
4. Setengah Menganggur, Pengangguran jenis ini ditujukan pada seseorang yang mempunyai pekerjaan namun jam kerja hanya sedikit atau tidak sesuai standar 7- 8 per hari sehingga penghasilan mereka pun kadang tidak mencukupi.

Meskipun pengangguran yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan, namun tetap saja hal positif ini tidak banyak memberikan semangat pada banyak orang. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu:

1. Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Lapangan Pekerjaan tidak Seimbang;

Saat ini memang banyak sekali lulusan - lulusan sarjana bahkan magister yang bisa dibilang berpengalaman, namun karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, inilah yang membuat banyaknya pengangguran di Indonesia. Apalagi saat ini populasi di Indonesia sedang banyak - banyaknya.

2. Kemajuan Teknologi; Saat ini sudah banyak pabrik yang hanya membutuhkan sedikit pekerja karena kebanyakan posisi nya sudah diambil oleh robot. Selain biaya lebih murah, menggunakan robot juga membuat pekerjaan lebih cepat.
3. Kurangnya Pendidikan; Semakin tinggi gelar dan derajat seseorang, maka akan semakin mudah dia mendapatkan pekerjaan, sehingga jika ada seseorang yang tingkat pendidikannya rendah, biasanya dia akan menjadi buruh kasar saja, apalagi jika seseorang itu tidak memiliki jiwa usaha.
4. Kemiskinan; Orang yang tumbuh di lingkungan dan keluarga miskin biasanya juga akan tumbuh menjadi orang yang kekurangan pula. Hal ini dikarenakan kebanyakan rakyat bawah Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang baik sehingga banyak dari mereka yang menganggur.
5. PHK; Biasanya, perusahaan melakukan PHK untuk menstabilkan sistem kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa dibilang suatu hal yang paling ditakuti karyawan swasta, karena jika kontrak kerja habis atau adanya pengurangan karyawan yaitu PHK, karyawan swasta yang asalnya bekerja di perusahaan tersebut akan kebingungan mencari pekerjaan di tempat lain.
6. Persaingan Pasar Global; Saat ini di Indonesia sudah ada banyak

perusahaan asing yang didirikan, namun mereka lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja dari Indonesia. Alasannya karena keterampilan juga kemampuan tenaga kerja lokal masih tidak sesuai dengan persyaratan mereka.

7. Kesulitan Mencari Lowongan Kerja; Banyak perusahaan yang tidak mengumumkan posisi yang dibutuhkan dengan baik sehingga banyak orang yang memiliki potensial besar ketinggalan dan kehilangan informasi. Banyak perusahaan - perusahaan yang hanya mengumumkannya dengan menempelkan kertas di gedungnya. Selain itu juga biasanya pencari kerja sering malas untuk mencari informasi lowongan pekerjaan.

2.6. Dampak Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pengangguran

Penyerapan tenaga kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran dalam suatu ekonomi. Ketika penyerapan tenaga kerja meningkat, pengangguran cenderung menurun, sedangkan ketika penyerapan tenaga kerja menurun, tingkat pengangguran cenderung meningkat. Dalam konteks ini, penyerapan tenaga kerja merujuk pada kemampuan pasar tenaga kerja untuk menyerap jumlah orang yang mencari pekerjaan.

Ketika sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang kuat, baik dalam sektor manufaktur, jasa, atau industri lainnya, maka perusahaan-perusahaan akan membutuhkan lebih banyak pekerja. Ini akan mengakibatkan peningkatan penawaran pekerjaan, yang pada gilirannya akan membantu menurunkan tingkat pengangguran. Penyerapan tenaga kerja yang baik juga menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial, karena

orang-orang yang bekerja memiliki penghasilan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Namun, jika ekonomi mengalami perlambatan atau resesi, penyerapan tenaga kerja cenderung menurun. Perusahaan dapat memotong jumlah pekerja atau bahkan menghentikan perekrutan baru. Ini akan meningkatkan tingkat pengangguran, karena pekerjaan yang ada menjadi lebih sulit ditemukan. Pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, serta menurunkan tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, perubahan teknologi, dan perubahan struktur ekonomi juga dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang bagaimana penyerapan tenaga kerja berinteraksi dengan tingkat pengangguran sangat penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat secara umum dalam merencanakan kebijakan dan strategi ekonomi.

Penyerapan tenaga kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Data-data terbaru menunjukkan sejumlah fenomena terkait dengan hubungan antara penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka: Salah satu indikator pengangguran di Indonesia adalah tingkat pengangguran terbuka. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka mencapai sekitar 6,4 persen dari total angkatan kerja. Penyerapan

tenaga kerja yang rendah dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka ini.

2. **Pertumbuhan Ekonomi:** Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki dampak langsung pada penyerapan tenaga kerja. Jika ekonomi tumbuh, lebih banyak peluang kerja dapat tercipta, dan tingkat pengangguran cenderung menurun. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi melambat, tingkat pengangguran dapat meningkat.
3. **Sektor Ekonomi:** Sektor ekonomi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor yang berkembang pesat, seperti sektor jasa, dapat memberikan lebih banyak peluang pekerjaan. Sebaliknya, sektor yang mengalami stagnasi atau penurunan, seperti sektor pertanian, dapat mengakibatkan kurangnya peluang kerja.
4. **Pelatihan dan Kualifikasi:** Tingkat kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja juga memengaruhi penyerapan. Data menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan kualifikasi dan keterampilan yang sesuai lebih mudah terserap dalam pasar kerja. Oleh karena itu, upaya pelatihan dan peningkatan kualifikasi penting untuk mengurangi pengangguran.
5. **Mobilitas Geografis:** Mobilitas geografis juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Beberapa daerah di Indonesia mungkin memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi daripada daerah lain. Orang yang bersedia untuk berpindah tempat tinggal untuk mencari pekerjaan mungkin memiliki peluang lebih baik untuk terserap dalam pasar tenaga kerja.
6. **Pertumbuhan Penduduk:** Pertumbuhan penduduk juga memiliki dampak

signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Indonesia memiliki populasi yang terus tumbuh, dan ini berarti ada lebih banyak orang yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya. Untuk mengatasi peningkatan pengangguran, pertumbuhan ekonomi harus mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang terus bertambah.

Kesimpulannya, penyerapan tenaga kerja memiliki dampak langsung pada tingkat pengangguran di Indonesia. Banyak faktor yang memengaruhi hubungan ini, termasuk pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi, kualifikasi tenaga kerja, mobilitas geografis, dan pertumbuhan penduduk. Pemerintah, bersama dengan sektor swasta dan pendidikan, perlu berkolaborasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di negara ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis dan mengetahui penyerapan tenaga kerja serta dampaknya terhadap pengangguran di Kabupaten Konawe. Kajian ini penting karena aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar ekonomi yang menentukan fluktuasi pembangunan suatu wilayah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data secara naratif sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif. Suatu penelitian dengan metode Kualitatif Deskriptif-Analisis, adalah metode yang memberikan hasil berdasarkan fakta yang ada dilapangan serta fakta yang diperoleh melalui informan. Pendekatan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan faktor-faktor subjektif yang mungkin tidak dapat diukur dengan angka.

Berikut adalah beberapa langkah tambahan terkait dengan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini:

- Seleksi Responden; menentukan siapa yang akan diwawancara dan diobservasi. Ini mencakup pemangku kepentingan seperti pekerja, pengusaha, atau perwakilan pemerintah yang relevan. Variasi dalam pemilihan responden untuk mendapatkan beragam perspektif.
- Pengembangan Panduan Wawancara; rancang panduan wawancara yang terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan

responden untuk berbicara secara mendalam tentang pengalaman mereka terkait penyerapan tenaga kerja sektoral dan pengangguran. Panduan ini dapat digunakan sebagai panduan selama wawancara.

- Observasi Lapangan: Ketika melakukan observasi, catat informasi yang relevan tentang situasi lapangan dan proses penyerapan tenaga kerja sektoral. Observasi dapat melibatkan pemantauan langsung kegiatan di sektor-sektor ekonomi tertentu atau lokasi kerja.
- Analisis Kualitatif: Setelah mengumpulkan data kualitatif, analisis data harus dilakukan. Ini dapat melibatkan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul dari wawancara dan observasi. Anda dapat menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo atau secara manual melakukan analisis kualitatif.
- Penafsiran dan Kesimpulan: Hasil analisis kualitatif digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mungkin tidak terlihat dalam data kuantitatif, seperti perasaan, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh individu atau sektor ekonomi. Ini dapat membantu Anda mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang dampak penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap angka pengangguran.

Pendekatan kualitatif ini memberikan dimensi tambahan pada penelitian ini dan memungkinkan untuk menjelajahi aspek subjektif dari isu yang diteliti. Data kualitatif dapat digunakan bersamaan dengan data kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang topik penelitian ini.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Konawe, dengan fokus pada pengambilan data yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja sektoral dalam 2 tahun terakhir, dengan sasaran pada 5 (lima) kecamatan sebagai sampel lokasi.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1998). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sektor yang menjadi penyerap tenaga kerja yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Konawe. Mengingat Kabupaten Konawe cukup luas maka sampel lokasinya adalah 3 kecamatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah-wilayah tersebut cukup representatif dengan adanya sektor-sektor yang cukup banyak menyerap jumlah tenaga kerja.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif, yaitu berupa informasi antara lain data tentang jumlah tenaga kerja yang terserap, kondisi sektor-sektor penyerap tenaga kerja, angka pengangguran dan sebagainya.

Selanjutnya sumber data, terdiri dari sumber data primer yaitu berupa informasi baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif, yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dilapangan dengan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan. Selain data primer juga sumber

data dalam penelitian ini adalah data sekunder, adalah dukungan data yang berasal dari instansi yang terkait, antara lain Dinas Tenaga Kerja, Bappeda, dan SKPD lainnya yang relevan dengan substansi penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap dokumen, arsip, laporan-laporan, dan bahan referensi kepustakaan lainnya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi Lapangan

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti aktif melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi objektif di lapangan, misalnya aktifitas tenaga kerja pada beberapa sektor.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan dialog langsung dengan informan. Tanya jawab dilakukan berdasarkan draft panduan wawancara yang akan berkembang di lapangan sesuai dengan kondisi objektifnya dengan selalu berpedoman pada keterkaitan substansi penelitian. Dengan wawancara mendalam maka akan dilakukan penggalian informasi sebanyak mungkin sehingga data-data yang diperoleh dapat lebih lengkap sesuai kebutuhan penelitian.

3. Kuisioner

Adalah instrumen pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden, Daftar pertanyaan

tersebut menyangkut substansi penelitian, baik pertanyaan yang sifatnya terbuka, semi terbuka, maupun tertutup.

4. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara penelusuran referensi yang relevan dengan substansi penelitian, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

3.6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis baik pada saat penelitian sedang berlangsung maupun telah selesai penelitian lapangan. Teknik analisis data yang bersifat "*kualitatif interpretatif*" yang diproses melalui upaya penelaan data, reduksi data, kategorisasi data, pemeriksaan keabsahan data, hingga pada penafsiran data. (Milles dan Hubermann 1992).

Singarimbun dan Effendi (1984) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Sedangkan menurut Patton, 1980 (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dengan prosedur pekerjaan analisis data yaitu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Analisis data dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaan dimulai sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif dan secepatnya agar data tersebut tidak kadaluarsa.

Maleong (1991); Miles dan Huberman (1988) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data meliputi:

1. Reduksi data (*data reduction*),

Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.

Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak penelitian mulai memfokuskan wilayah penelitian. (Miles dan Huberman ; 1992)

2. penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan hasil dari proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Di dalam penyajian data terdapat rangkaian informasi yang disajikan berupa data yang diperoleh sebagai jenis jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

3. Interpretasi data (*data interpretation*)

Merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Konawe adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe memiliki potret kondisi wilayah yang beragam karakteristik geografis dan lingkungan. Kabupaten Konawe terletak di bagian Tenggara Pulau Sulawesi, dan memiliki luas wilayah yang signifikan. Luas wilayah Kabupaten Konawe, adalah sekitar 4.435,28 km². Luas wilayah tersebut mencakup beragam jenis lahan, termasuk daratan, pantai, pegunungan, hutan, dan wilayah perairan, yang membuat Kabupaten Konawe memiliki karakteristik geografis yang beragam.

Kabupaten ini memiliki perbatasan dengan Laut Banda di sebelah selatan, Kabupaten Konawe Utara di sebelah utara, dan Kabupaten Bombana di sebelah barat. Wilayah Kabupaten Konawe sangat beragam, dengan pantai yang panjang dan berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah Timur. Wilayah pesisir ini menjadi area yang penting untuk pengembangan kelautan dan perikanan. Selain itu, terdapat pula pegunungan dan dataran tinggi di wilayah bagian Utara Kabupaten Konawe. Pegunungan ini memiliki potensi sumber daya alam yang penting, seperti hutan dan lahan pertanian.

Kondisi iklim di Kabupaten Konawe cenderung tropis, dengan musim hujan dan musim kemarau yang berbeda. Hal ini memengaruhi pola pertanian dan musim panen di wilayah ini. Juga terdapat beberapa sungai yang penting,

yang menjadi sumber air bersih dan mendukung kehidupan masyarakat sekitar.

Kabupaten Konawe terdiri dari 27 kecamatan, 57 kelurahan dan 297 desa dengan luas wilayah 4.435,28 km² (BPS 2023). Sejumlah desa merupakan pemukiman penduduk yang tersebar di seluruh wilayahnya. Masyarakatnya memiliki beragam kegiatan ekonomi, dari pertanian hingga nelayan, serta perdagangan.

Infrastruktur jalan di Kabupaten Konawe berkembang, terutama di wilayah pesisir dan sekitarnya. Ini memungkinkan akses yang baik ke berbagai lokasi lainnya. Selain itu, terdapat beberapa pelabuhan yang digunakan untuk distribusi barang dan jasa, serta transportasi laut antar-pulau. Selain itu terdapat potensi pariwisata yang cukup besar, terutama di pantai-pantai indah dan situs-situs budaya yang menarik.

Wilayah Kabupaten Konawe memiliki berbagai sumber daya alam yang memiliki potensi sebagai objek pembangunan wilayah. Di antara sumber daya alam tersebut, termasuk di dalamnya:

- a. Hutan-hutan di wilayah ini menjadi subjek penelitian yang penting, karena mereka menyimpan beragam keanekaragaman hayati, ekosistem yang kompleks, dan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Penelitian hutan dapat meliputi survei biodiversitas, pemantauan deforestasi, konservasi tumbuhan langka, dan keberlanjutan pengelolaan hutan.
- b. Tambang; Sumber daya tambang yang ada di wilayah ini, seperti logam, mineral, atau batu bara, juga menjadi fokus penelitian. Penelitian di

bidang ini mencakup penilaian kualitas sumber daya, dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan, serta pengelolaan dan keberlanjutan sumber daya tambang.

- c. Perikanan; Potensi perikanan, baik di perairan laut maupun sungai, menjadi bagian penting dari penelitian di wilayah ini. Ini mencakup studi mengenai stok ikan, praktek perikanan berkelanjutan, pengaruh perubahan iklim terhadap ekosistem laut, dan upaya untuk melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati laut. Penelitian terkait dengan sumber daya alam ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengelolaan yang lebih baik, keberlanjutan, serta perlindungan lingkungan, sambil juga mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya ini.
- d. Kabupaten Konawe juga merupakan tempat bagi beberapa taman nasional dan kawasan konservasi alam yang memegang peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Taman nasional dan kawasan konservasi ini merupakan bagian integral dari upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem alam di wilayah Kabupaten Konawe. Kehadiran taman nasional dan kawasan konservasi alam di Kabupaten Konawe merupakan aset berharga dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempertahankan kekayaan keanekaragaman hayati di daerah ini. Dengan pelestarian yang baik, mereka dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat setempat.

4.1.2. Kondisi Demografis

Kabupaten Konawe merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kondisi demografis yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berikut adalah beberapa gambaran umum mengenai kondisi demografis di Kabupaten Konawe:

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Konawe dapat berubah seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2022 mencapai 266.299 jiwa, angka tersebut dapat mengalami peningkatan atau penurunan. Kabupaten Konawe, yang terletak di provinsi Sulawesi Tenggara, adalah sebuah wilayah yang menarik dengan kondisi demografis yang beragam. Kabupaten ini memiliki luas wilayah yang cukup besar, dan demografinya mencerminkan keberagaman budaya dan etnis yang khas.

Populasi Kabupaten Konawe terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data statistik terbaru, populasi penduduknya mencapai angka yang mengesankan, menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Kondisi demografis Kabupaten Konawe juga mencerminkan keragaman etnis. Terdapat beragam suku dan etnis yang tinggal di kabupaten ini, seperti suku Tolaki, Bugis, Jawa, Bali, dan beberapa etnis lainnya. Keberagaman ini menciptakan budaya yang kaya dan beragam. Seiring dengan pertumbuhan populasi, Kabupaten Konawe juga mengalami peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Wilayah Wawotobi, Unaaha, Anggaberri, Tongauna, dan Uepai adalah Kecamatan-Kecamatan yang mendukung Kota Unaaha.

Dari segi usia, Kabupaten Konawe memiliki distribusi usia yang cukup seimbang, dengan jumlah penduduk yang cukup signifikan dalam kelompok usia produktif. Ini memberikan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di masa depan.

Tingkat pendidikan juga memainkan peran penting dalam demografi Kabupaten Konawe. Data statistik menunjukkan bahwa pendidikan dasar dan menengah semakin merata, namun tantangan tetap ada dalam meningkatkan akses ke pendidikan tinggi di wilayah ini. Selain itu, sektor pekerjaan di Kabupaten Konawe sangat beragam. Banyak penduduk yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perdagangan. Namun, sektor industri dan jasa juga semakin berkembang, menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.

Kesejahteraan penduduk juga menjadi perhatian penting. Data statistik menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Konawe masih hidup dalam kondisi ekonomi yang sederhana, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Demografi Kabupaten Konawe juga mencerminkan keragaman agama, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sementara agama-agama lain juga memiliki kehadiran yang signifikan.

Kabupaten Konawe adalah tempat yang unik dengan kondisi demografis yang mencerminkan keberagaman dan pertumbuhan yang positif. Data statistik memberikan pandangan yang komprehensif tentang karakteristik penduduknya, yang menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

4.2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja sektoral di Kabupaten Konawe

Tingkat penyerapan tenaga kerja sektoral di Kabupaten Konawe dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang sangat kompleks. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal yang memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana sektor-sektor ekonomi di kabupaten ini mampu menyerap tenaga kerja.

a. Faktor internal

Pertama yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah struktur ekonomi lokal. Kabupaten Konawe memiliki sektor ekonomi yang didominasi oleh pertanian, perikanan, pertambangan, dan perdagangan. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan masing-masing sektor ini dapat berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Seiring dengan perubahan ekonomi dan inovasi teknologi, sektor-sektor ini dapat mengalami fluktuasi dalam penyerapan tenaga kerja.

Sektor pertanian dan perkebunan berkembang di wilayah-wilayah agraris dengan topografi yang mendukung yaitu di Amonggedo dan Kecamatan Wonggeduku. Kecamatan Amonggedo memiliki luas lahan pertanian 7.976 Ha, sedangkan Kecamatan Wonggeduku seluas 6.714 Ha. Kedua lokasi ini merupakan area geografis yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan produksi pertanian. Lokasi atau wilayah pertanian tersebut fokus pada usaha padi sawah dan perkebunan yang memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Pertanian menjadi salah satu sektor utama dalam menciptakan lapangan kerja di wilayah tersebut. Petani lokal dan

pekerja musiman terlibat dalam berbagai kegiatan seperti penanaman, perawatan, dan panen tanaman. Berdasarkan gambaran tersebut, maka sektor pertanian sebagai salah satu struktur ekonomi lokal Kabupaten Konawe cukup besar menyerap tenaga kerja.

Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Konawe adalah struktur ekonomi lokal yang didominasi oleh sektor-sektor berikut:

Pertanian: Sektor pertanian di Kabupaten Konawe meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sektor pertanian di Kabupaten Konawe menyerap tenaga kerja sebanyak 50.000 orang. Selanjutnya, **Sektor Perikanan:** Kabupaten Konawe memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah, seperti ikan, udang, dan kepiting. Sektor perikanan di Kabupaten Konawe juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan menyerap tenaga kerja lokal. **Perdagangan:** Sektor perdagangan di Kabupaten Konawe juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan menyerap tenaga kerja lokal. Sektor perdagangan meliputi perdagangan grosir, eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor

Kemudian **sektor Pertambangan:** Kabupaten Konawe memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk sektor pertambangan nikel. PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas nikel. Apabila telah beroperasi secara penuh, Kawasan Industri di Morosi potensial menyerap tenaga kerja sebesar 60.000 orang di Kabupaten Konawe.

Dari faktor-faktor internal tersebut, sektor pertanian dan perikanan masih menjadi sektor yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Konawe. Namun, sektor pertambangan nikel juga memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab terhadap sektor-sektor tersebut agar dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Selain itu, faktor infrastruktur juga memiliki pengaruh besar. Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dapat memengaruhi kemampuan sektor-sektor ekonomi untuk tumbuh dan menyerap tenaga kerja. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor tersebut.

Dalam konteks Kabupaten Konawe, infrastruktur yang baik dan berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan perdagangan. Sebagai contoh, jalan yang baik dan lancar dapat mempermudah transportasi hasil pertanian dan perikanan ke pasar, sehingga meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor tersebut. Selain itu, pelabuhan dan bandara yang baik dapat mempermudah distribusi hasil pertambangan ke luar daerah, sehingga meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor pertambangan. Namun, infrastruktur yang buruk atau tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor ekonomi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur yang baik dan berkualitas di Kabupaten Konawe agar dapat meningkatkan produktivitas dan

daya saing sektor-sektor ekonomi serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

Kualitas sumber daya manusia juga memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga mereka lebih mudah diserap oleh sektor-sektor ekonomi yang memerlukan keterampilan khusus. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Pelatihan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga mereka lebih mudah diserap oleh sektor-sektor ekonomi yang memerlukan keterampilan khusus. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam organisasi. Pengembangan sumber daya manusia memiliki tujuan untuk mendapatkan sumber-sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien. Tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi ini akan menguntungkan perusahaan. Fungsi pengembangan sumber daya manusia antara lain adalah pengadaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, dan pengelolaan tenaga kerja.

Faktor kebijakan pemerintah juga berpengaruh signifikan. Kebijakan yang mendukung investasi, pengembangan sektor ekonomi tertentu, dan penciptaan lapangan kerja dapat memacu penyerapan tenaga kerja. Selain itu, regulasi yang terkait dengan tenaga kerja, seperti upah minimum dan perlindungan pekerja, juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menyerap atau mengurangi tenaga kerja.

4.3. Dampak dari penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap angka pengangguran di Kabupaten Konawe

Dampak dari penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap angka pengangguran di Kabupaten Konawe merupakan fenomena kompleks yang terkait dengan sejumlah variabel dan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui analisis yang mendalam dan data yang teliti, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran di wilayah tersebut.

Studi tentang dampak penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap angka pengangguran di Kabupaten Konawe adalah suatu analisis yang penting dalam pemahaman ekonomi dan sosial wilayah tersebut. Penyerapan tenaga kerja adalah proses di mana individu-individu memasuki tenaga kerja dalam sektor-sektor tertentu, sementara angka pengangguran mencerminkan tingkat individu yang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Di bawah ini, akan diuraikan dampak dari penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap angka pengangguran di Kabupaten Konawe secara rinci dan mendalam:

1. *Peningkatan Kesempatan Kerja*; Penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu seperti pertanian, pertambangan, atau manufaktur dapat memberikan kesempatan kerja baru bagi penduduk Kabupaten Konawe. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran karena sektor-sektor ini berkembang dengan baik.

Peningkatan kesempatan kerja melalui penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu seperti pertanian, pertambangan, atau manufaktur adalah

langkah penting dalam mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Konawe. Kabupaten ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor-sektor ini dan menciptakan peluang kerja yang signifikan bagi penduduknya.

Pertanian adalah salah satu sektor yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi di Kabupaten Konawe. Wilayah ini memiliki lahan pertanian yang luas dan kondisi iklim yang mendukung berbagai jenis tanaman. Dengan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan dan berinvestasi dalam teknologi pertanian yang canggih, Kabupaten Konawe dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Ini telah menciptakan peluang kerja di berbagai tahap produksi pertanian, termasuk penanaman, perawatan, panen, dan distribusi. Selain itu, diversifikasi tanaman dan promosi pertanian organik juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan tambahan.

Pertambangan adalah sektor lain yang memiliki potensi besar untuk memberikan kesempatan kerja di Kabupaten Konawe. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, termasuk tambang mineral dan pertambangan lainnya. Penambangan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dalam pengoperasian tambang, eksplorasi, pengeboran, dan pemrosesan. Investasi dalam infrastruktur pertambangan yang modern dan keselamatan kerja dapat meningkatkan daya tarik sektor ini bagi pekerja lokal.

Manufaktur adalah sektor lain yang dapat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan mengembangkan industri manufaktur di Kabupaten Konawe, produk lokal dapat diolah dan dijual lebih lanjut, menciptakan pekerjaan dalam berbagai bidang, seperti produksi,

pengepakan, distribusi, dan pemasaran. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pengusaha lokal untuk mendirikan pabrik dan fasilitas manufaktur.

Selain sektor-sektor utama ini, sektor pariwisata juga memiliki potensi besar. Kabupaten Konawe memiliki keindahan alam, budaya yang kaya, dan berbagai atraksi wisata. Dengan mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan, banyak pekerjaan dapat diciptakan di industri pariwisata, restoran, pariwisata petualangan, parawisata budaya, dan sektor-sektor terkait lainnya.

Peningkatan peluang kerja juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor pertanian, pertambangan, dan manufaktur dapat meningkatkan kualifikasi tenaga kerja lokal dan membuat mereka lebih berdaya saing di pasar kerja.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan lokal sangat penting dalam mengakselerasi penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor ini. Perjanjian kemitraan dan investasi dapat membantu menciptakan peluang kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Namun, perlu diingat bahwa penyerapan tenaga kerja harus diiringi dengan kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja, termasuk upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, dan akses ke perlindungan sosial. Dalam hal ini, regulasi ketenagakerjaan yang jelas dan penerapan hukum yang ketat diperlukan untuk menjaga keadilan di tempat kerja.

Peningkatan kesempatan kerja di sektor pertanian, pertambangan, dan manufaktur adalah langkah penting menuju pengurangan tingkat pengangguran di Kabupaten Konawe. Dengan potensi yang melimpah dan upaya yang terkoordinasi, wilayah ini dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi penduduknya.

2. *Kualifikasi Pendidikan*; Sebagian besar sektor memerlukan kualifikasi pendidikan dan keterampilan tertentu di Kabupaten Konawe. Penyerapan tenaga kerja sektoral akan memengaruhi persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat pengangguran, terutama jika pelatihan yang sesuai tidak tersedia.

Penyerapan tenaga kerja sektoral di Kabupaten Konawe memiliki dampak signifikan terhadap persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat. Sebagian besar sektor ekonomi mengharuskan individu memiliki kualifikasi pendidikan dan keterampilan tertentu untuk dapat bersaing di pasar kerja. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah penduduk lokal dapat mengakses peluang pekerjaan yang tersedia.

Penting untuk memahami bahwa persyaratan pendidikan dan pelatihan dalam setiap sektor dapat bervariasi secara signifikan. Sebagai contoh, sektor pertanian mungkin memerlukan kualifikasi yang lebih rendah, seperti sertifikat pertanian atau pelatihan praktis, sementara sektor teknologi informasi mungkin memerlukan gelar sarjana atau keterampilan teknis yang tinggi. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja sektoral memengaruhi

individu dan komunitas secara berbeda tergantung pada sektor yang mereka incar.

Dalam konteks Kabupaten Konawe, faktor geografis dan lingkungan juga dapat memengaruhi persyaratan pendidikan dan pelatihan. Misalnya, sektor pertambangan mungkin menjadi salah satu pilihan pekerjaan utama, dan persyaratan kerja di sektor ini biasanya berkaitan dengan keahlian teknis dan keselamatan tambang. Untuk dapat bekerja di sektor ini, penduduk lokal mungkin harus menjalani pelatihan khusus yang memenuhi standar keamanan dan teknis.

Namun, masalah utama yang muncul adalah ketersediaan pelatihan yang sesuai dan pendidikan yang relevan untuk memenuhi persyaratan sektoral. Kabupaten Konawe mungkin menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur pendidikan dan pelatihan yang memadai di semua sektor ekonomi. Ini dapat menjadi penyebab utama pengangguran jika penduduk lokal tidak memiliki akses ke pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan sektor-sektor utama di wilayah tersebut.

Pentingnya persiapan pendidikan dan pelatihan yang tepat dalam menghadapi perubahan sektoral tidak bisa diabaikan. Dalam lingkungan global yang terus berubah, adaptasi dan peningkatan kualifikasi menjadi kunci dalam menjaga daya saing tenaga kerja. Kabupaten Konawe harus aktif berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan permintaan sektoral. Ini dapat melibatkan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah pusat untuk memastikan penduduk lokal memiliki akses yang memadai.

Selain itu, pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan sektoral juga dapat menjadi solusi yang efektif. Program-program ini dapat membantu individu memperoleh keterampilan yang dibutuhkan oleh sektor-sektor utama di Kabupaten Konawe dan meningkatkan peluang kerja mereka. Namun, program ini harus dirancang dengan cermat agar sesuai dengan perkembangan sektoral yang dinamis.

Selain itu, penting untuk menciptakan hubungan yang kuat antara sektor pendidikan dan industri. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan sektor, serta menyediakan orientasi pendidikan yang lebih tepat. Pemerintah kabupaten, dalam kerjasama dengan pihak swasta, juga dapat memberikan insentif untuk mendukung pelatihan sektor tertentu yang dianggap kritis bagi pertumbuhan ekonomi.

Dampak penyerapan tenaga kerja sektoral pada persyaratan pendidikan dan pelatihan juga mempengaruhi mobilitas tenaga kerja. Penduduk lokal yang mungkin tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk sektor utama di wilayah tersebut mungkin terpaksa berpindah atau menganggur. Ini dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan ekonomi komunitas setempat.

Selain itu, penting untuk mengingat bahwa perubahan sektoral dapat memengaruhi seluruh siklus pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Perguruan tinggi di wilayah ini juga perlu memastikan bahwa program-program yang mereka tawarkan sesuai dengan kebutuhan sektoral dan bahwa lulusan mereka memiliki kualifikasi yang relevan. Dengan demikian, hubungan erat antara lembaga pendidikan

dan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Konawe menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa penduduk lokal memiliki akses ke pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilan mereka.

Selain pendidikan, penting juga untuk mempertimbangkan aspek pelatihan keterampilan. Kabupaten Konawe harus aktif mendukung program pelatihan keterampilan yang dapat membantu individu meningkatkan keterampilan yang relevan untuk sektor ekonomi lokal. Ini bisa mencakup program pelatihan teknis, keterampilan manajemen, dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri tertentu.

Selain itu, upaya juga harus diarahkan pada memfasilitasi transfer keterampilan dan pengetahuan antara generasi. Ini terutama relevan ketika sektor ekonomi berubah secara signifikan. Para pekerja yang lebih berpengalaman dapat membantu dalam mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan mereka kepada generasi muda, memastikan kelangsungan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Kebijakan dan inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan sektor-sektor yang berhubungan dengan lapangan kerja lokal akan memiliki dampak positif pada tingkat pengangguran. Dengan meningkatkan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja lokal, sektor-sektor utama di Kabupaten Konawe dapat lebih mudah mengisi posisi yang tersedia dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing daerah ini dalam menarik investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa perubahan sektoral adalah fenomena yang alami dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah. Oleh

karena itu, penyesuaian dan pembaharuan pendidikan dan pelatihan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan jangka panjang Kabupaten Konawe. Melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, wilayah ini dapat menciptakan ekosistem yang mendukung penyerapan tenaga kerja yang efisien, berkontribusi pada penurunan angka pengangguran, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

3. *Mobilitas Tenaga Kerja*; Penyerapan tenaga kerja sektoral dapat mengarah pada mobilitas tenaga kerja, di mana penduduk Kabupaten Konawe mungkin harus bekerja di lokasi yang jauh dari rumah mereka. Hal ini dapat memengaruhi angka pengangguran jika penduduk tidak siap untuk berpindah atau jika akses transportasi terbatas.

Mobilitas tenaga kerja adalah fenomena penting yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja sektoral, dan pemahaman yang mendalam tentang dampaknya terhadap angka pengangguran adalah kunci dalam mengelola pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Mobilitas tenaga kerja merujuk pada kemampuan atau kebutuhan penduduk untuk berpindah dari tempat tinggal mereka untuk mencari pekerjaan atau mendukung aktivitas ekonomi. Penyerapan tenaga kerja sektoral yang efektif dapat memicu mobilitas tenaga kerja di berbagai tingkatan.

Kabupaten Konawe, dengan beragam topografi yang mencakup dataran rendah, perbukitan, dan dataran tinggi, memberikan tantangan tersendiri dalam hal mobilitas tenaga kerja. Terutama, kondisi geografis dan distribusi sektor ekonomi yang berbeda dapat memengaruhi apakah penduduk harus berpindah atau tidak. Misalnya, pekerjaan di sektor pertanian mungkin tidak memerlukan mobilitas signifikan, sementara sektor pertambangan atau industri bisa mengharuskan penduduk untuk mencari pekerjaan di lokasi yang jauh.

Dampak dari mobilitas tenaga kerja dapat sangat bervariasi. Pada satu sisi, mobilitas tenaga kerja dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Konawe dengan memberikan kesempatan kerja di sektor-sektor yang memerlukan tenaga kerja tambahan. Ini bisa membantu mengurangi tekanan sosial dan ekonomi yang terkait dengan pengangguran. Namun, mobilitas tenaga kerja juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik.

Perlu diperhatikan bahwa mobilitas tenaga kerja bisa menghadapi berbagai hambatan. Beberapa penduduk mungkin tidak siap atau tidak mampu untuk berpindah dari rumah mereka karena pertimbangan seperti keterbatasan keuangan, keterikatan dengan komunitas, atau permasalahan keluarga. Selain itu, akses transportasi yang terbatas dapat menjadi hambatan serius dalam mobilitas tenaga kerja, terutama jika pekerjaan yang tersedia terletak di wilayah yang sulit diakses.

Kabupaten Konawe perlu mempertimbangkan berbagai strategi untuk mengelola mobilitas tenaga kerja dengan bijaksana. Salah satunya adalah

meningkatkan akses transportasi ke daerah-daerah dengan potensi pekerjaan. Ini bisa melibatkan pengembangan infrastruktur transportasi seperti jalan dan layanan transportasi publik. Selain itu, program pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat membantu meningkatkan mobilitas tenaga kerja dengan meningkatkan kualifikasi dan keterampilan pekerja, sehingga mereka lebih mudah berpindah antar sektor ekonomi.

Selain itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Konawe untuk memantau dampak mobilitas tenaga kerja secara berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup pemantauan angka pengangguran, perubahan sosial di masyarakat, dan perkembangan ekonomi lokal. Dengan pemahaman yang mendalam tentang mobilitas tenaga kerja dan dampaknya, Kabupaten Konawe dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengelola tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selanjutnya, pendekatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan adalah kunci untuk mengelola mobilitas tenaga kerja dengan baik. Hal ini termasuk mempromosikan peluang pekerjaan yang berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Kabupaten Konawe juga perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan sektoral yang memicu mobilitas tenaga kerja dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang mungkin terpengaruh secara negatif oleh mobilitas tersebut.

Selain itu, peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan sangat penting dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk mobilitas. Program-program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan

keterampilan, adaptabilitas, dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan kerja dapat membantu tenaga kerja menjadi lebih siap untuk berpindah.

Dalam konteks Kabupaten Konawe, ada potensi besar untuk pengembangan sektor ekonomi tertentu yang dapat memerlukan mobilitas tenaga kerja. Kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah, termasuk pertambangan, kehutanan, dan pertanian. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari sektor-sektor ini, perlu adanya perencanaan yang matang, investasi dalam infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung mobilitas tenaga kerja yang berkelanjutan.

Penting juga untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe dan yang mungkin memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Ini dapat mencakup pengembangan sektor pariwisata, manufaktur, atau sektor jasa. Dengan mengidentifikasi peluang pertumbuhan ini, Kabupaten Konawe dapat merancang strategi untuk mengarahkan mobilitas tenaga kerja ke sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Selain itu, Kabupaten Konawe harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan dan penyerapan tenaga kerja sektoral mencerminkan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Ini termasuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari pertumbuhan sektor ekonomi tertentu, serta memastikan bahwa masyarakat setempat mendapat manfaat dari perkembangan ekonomi ini.

Penting juga untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan yang mungkin timbul sebagai akibat dari mobilitas tenaga kerja. Beberapa penduduk mungkin memiliki lebih banyak akses dan sumber daya untuk berpindah daripada yang lain, dan ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan dan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang meratakan kesempatan pekerjaan dan meminimalkan ketidaksetaraan.

Dalam keseluruhan proses mobilitas tenaga kerja, komunikasi dan keterlibatan aktif masyarakat sangat penting. Pemerintah Kabupaten Konawe harus berkomunikasi dengan masyarakat setempat, mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran mereka, dan berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan dan penyerapan tenaga kerja sektoral. Ini akan membantu menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan dalam mengelola mobilitas tenaga kerja. Dalam mengelola mobilitas tenaga kerja, Kabupaten Konawe juga harus mempertimbangkan isu-isu sosial seperti pemisahan keluarga dan dampak psikologis dari berpindah-pindah. Ini dapat memerlukan dukungan sosial dan layanan kesejahteraan yang sesuai bagi penduduk yang terlibat dalam mobilitas tenaga kerja.

Selain itu, kebijakan penyerapan tenaga kerja sektoral yang baik harus memperhitungkan perlindungan hak tenaga kerja. Ini mencakup upah yang adil, kondisi kerja yang aman, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap eksploitasi. Memastikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Konawe mendapat perlindungan yang layak adalah suatu kewajiban.

Penting juga untuk mengatasi isu-isu seperti transportasi yang terbatas yang dapat menjadi hambatan dalam mobilitas tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Konawe dapat mempertimbangkan investasi dalam infrastruktur transportasi yang dapat memfasilitasi mobilitas tenaga kerja, seperti jaringan jalan yang baik, transportasi publik yang efisien, dan aksesibilitas yang meningkat.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas tenaga kerja, Kabupaten Konawe harus memperhatikan dampak sosial yang mungkin timbul, termasuk perubahan dalam struktur sosial dan kebutuhan masyarakat. Dampak ini dapat termasuk perubahan dalam pola migrasi penduduk, pengaruh terhadap budaya dan identitas masyarakat, serta kebutuhan akan fasilitas dan layanan publik yang berkembang.

Dalam upaya mengelola mobilitas tenaga kerja, penting juga untuk mempertimbangkan pendidikan dan pelatihan. Ini termasuk program yang dapat membantu tenaga kerja mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja. Mendorong pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan adalah kunci dalam membantu penduduk Kabupaten Konawe menjadi lebih siap untuk mobilitas tenaga kerja.

Terkait dengan mobilitas tenaga kerja, penting juga untuk memperhitungkan isu-isu kesejahteraan sosial. Mobilitas tenaga kerja dapat menyebabkan ketidakstabilan dan risiko sosial bagi beberapa penduduk, termasuk hilangnya jaringan sosial dan dukungan. Oleh karena itu, perlu ada layanan dukungan sosial dan psikologis bagi penduduk yang terlibat dalam mobilitas tenaga kerja.

pemahaman yang mendalam tentang dampak dan tantangan yang terkait dengan mobilitas tenaga kerja, Kabupaten Konawe dapat merancang kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi hak tenaga kerja, dan mengurangi angka pengangguran. Mobilitas tenaga kerja yang bijaksana dan berkelanjutan dapat menjadi salah satu kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif di wilayah ini.

4. *Penghasilan dan Kesejahteraan*; Sebuah sektor yang berkembang dapat meningkatkan penghasilan penduduk secara keseluruhan. Namun, dampaknya tergantung pada seberapa baik penghasilan tersebut didistribusikan dan apakah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penghasilan dan kesejahteraan adalah dua aspek penting dalam ekonomi yang saling terkait. Sebuah sektor yang berkembang dalam perekonomian suatu negara dapat berkontribusi signifikan pada peningkatan penghasilan penduduk secara keseluruhan. Namun, dampak dari pertumbuhan sektor tersebut tergantung pada seberapa baik penghasilan tersebut didistribusikan dan apakah pertumbuhan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam uraian yang mendalam ini, kita akan membahas hubungan antara pertumbuhan sektor, distribusi pendapatan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan penghasilan penduduk. Ketika sektor tertentu berkembang, biasanya akan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan individu dan rumah tangga. Bagaimanapun, penting untuk diingat bahwa penghasilan tidak

selalu didistribusikan dengan adil. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk ketidaksetaraan pendapatan, dengan sebagian keuntungan yang hanya dinikmati oleh segmen tertentu dari masyarakat.

Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mengakibatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang meningkat. Ini dapat mengarah pada ketegangan sosial dan masalah politik jika kesenjangan pendapatan terlalu besar. Penyebab ketidaksetaraan pendapatan dapat bervariasi, termasuk perbedaan dalam tingkat pendidikan, akses ke pekerjaan yang layak, dan kepemilikan aset ekonomi.

Salah satu dampak yang mungkin dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata adalah kemiskinan yang persisten. Meskipun sektor tertentu tumbuh, tetapi sebagian masyarakat masih hidup dalam kemiskinan yang ekstrem.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, distribusi pendapatan yang lebih adil menjadi kunci. Ini dapat dicapai melalui kebijakan pemerintah, seperti pajak progresif dan program bantuan sosial yang dirancang untuk mendukung kelompok yang lebih rentan.

Distribusi pendapatan yang lebih merata juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena konsumsi akan lebih stabil dan berkelanjutan. Pertumbuhan sektor ekonomi yang merata secara geografis juga penting. Terlalu sering, pertumbuhan ekonomi terpusat di daerah perkotaan, meninggalkan wilayah pedesaan terbelakang. Wilayah pedesaan yang kurang berkembang cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan akses ke lapangan kerja dan infrastruktur di pedesaan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan.

Sebuah sektor yang berkembang juga dapat memengaruhi lingkungan dan sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan, yang pada gilirannya dapat merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak lingkungan perlu menjadi prioritas dalam pertumbuhan sektor ekonomi.

Pertumbuhan sektor yang kuat seringkali didorong oleh inovasi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Ini bisa menghasilkan peningkatan produktivitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Namun, perlu dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti peningkatan kualitas hidup. Terkadang, fokus pada pertumbuhan murni dapat mengabaikan aspek kualitatif, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Kualitas hidup juga melibatkan aspek kesejahteraan sosial dan psikologis, seperti kebahagiaan, kepuasan hidup, dan kesejahteraan mental. Sebuah sektor yang berkembang juga dapat memicu urbanisasi, dengan banyak orang yang bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dan peluang.

Urbanisasi dapat menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan kota, termasuk infrastruktur yang memadai, perumahan yang terjangkau, dan akses terhadap layanan publik. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola pertumbuhan sektor ekonomi. Mereka dapat mengatur kebijakan yang mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata dan mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk investasi dan inovasi.

Kesejahteraan masyarakat juga terkait dengan aspek sosial, seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Sebuah sektor yang berkembang harus memperhatikan dampaknya terhadap aspek-aspek ini.

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam peningkatan kesejahteraan. Masyarakat yang terampil cenderung lebih siap menghadapi perubahan ekonomi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan sektor ekonomi. Kesejahteraan masyarakat juga terkait erat dengan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Dalam banyak kasus, pertumbuhan sektor ekonomi dapat meningkatkan akses ini. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan sektor ekonomi yang berorientasi hanya pada profit bisa mengabaikan aspek-aspek sosial, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang layak.

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan sosial dan lingkungan juga dapat memainkan peran dalam membentuk perilaku konsumen dan tekanan pada perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab.

Akhirnya, untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, penting untuk mencari keseimbangan

5. *Peningkatan Ekonomi Lokal*: Pertumbuhan sektor-sektor tertentu mungkin menghasilkan efek berantai yang positif dalam perekonomian lokal. Misalnya, sektor pertanian yang berkembang dapat mendorong pertumbuhan agribisnis lokal, yang akan menciptakan pekerjaan tambahan, sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan ekonomi lokal adalah tujuan utama bagi banyak daerah. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pengembangan sektor ekonomi tertentu, seperti sektor pertanian. Ketika sektor ini berkembang, hal itu tidak hanya memengaruhi sektor pertanian itu sendiri, tetapi juga menciptakan efek berantai positif yang dapat membawa manfaat besar bagi perekonomian lokal. Pertumbuhan sektor pertanian adalah kunci penting dalam peningkatan ekonomi lokal. Dalam banyak kasus, wilayah pedesaan memiliki potensi pertanian yang besar, dan ketika sektor ini berkembang, itu menghasilkan efek positif yang melibatkan banyak aspek ekonomi lokal. Pertama-tama, pertumbuhan sektor pertanian dapat menghasilkan peningkatan produksi tanaman dan ternak. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menciptakan peluang kerja tambahan di sektor pertanian. Orang-orang di wilayah pedesaan menjadi lebih terlibat dalam pekerjaan pertanian, dan mereka mungkin memerlukan pekerja tambahan untuk membantu mereka dalam proses produksi, seperti penanaman, pemeliharaan, dan panen.

Peningkatan produksi pertanian juga menggerakkan sektor agribisnis lokal. Ketika ada lebih banyak produk pertanian yang tersedia, banyak usaha agribisnis lokal akan mengalami pertumbuhan. Ini termasuk penggilingan, pengolahan, dan distribusi produk pertanian. Misalnya, peningkatan produksi padi dapat menghasilkan pertumbuhan pabrik penggilingan beras dan industri makanan yang memerlukan beras sebagai bahan baku.

Efek berantai positif ini melibatkan penciptaan lapangan kerja tambahan. Orang-orang yang bekerja di sektor agribisnis lokal akan memerlukan tenaga kerja untuk mengoperasikan pabrik, mengelola rantai pasokan, dan berbagai

tugas lainnya. Selain itu, sektor agribisnis ini juga menciptakan permintaan untuk layanan pendukung, seperti jasa pengiriman dan pengepakan. Dengan demikian, banyak lapangan kerja baru tercipta di ekosistem ekonomi lokal.

Peningkatan ekonomi lokal juga dapat dilihat melalui peningkatan daya beli penduduk. Ketika sektor pertanian dan agribisnis berkembang, pendapatan masyarakat meningkat karena mereka terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan sektor ini. Pendapatan tambahan ini memungkinkan penduduk untuk menghabiskan lebih banyak uang di pasar lokal. Ini mendukung pertumbuhan sektor ritel lokal, termasuk toko-toko, rumah makan, dan bisnis lainnya yang melayani kebutuhan masyarakat.

Selain itu, peningkatan ekonomi lokal sering menghasilkan peningkatan infrastruktur. Pemerintah lokal mungkin menginvestasikan pendapatan tambahan yang diterima dari pertumbuhan sektor pertanian dan agribisnis untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan produk pertanian. Ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pertanian, yang pada gilirannya dapat membawa manfaat bagi seluruh wilayah.

Efek berantai positif ini juga merangsang investasi asing dan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian. Peningkatan produksi pertanian dapat menarik perhatian investor yang tertarik untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Ini bisa berupa investasi dalam pengembangan infrastruktur, pengolahan makanan, atau bisnis terkait pertanian lainnya. Seiring berjalannya waktu, ini dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain dampak positif dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan sektor pertanian juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor produk pertanian. Dengan meningkatnya produksi lokal, wilayah tersebut mungkin lebih mandiri dari segi pasokan makanan dan lebih sedikit tergantung pada impor, yang pada gilirannya dapat mengurangi tekanan pada neraca perdagangan dan meningkatkan keamanan pangan lokal. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam proses ini. Pertumbuhan sektor pertanian memerlukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Overexploitasi sumber daya alam, seperti tanah dan air, dapat mengancam keberlanjutan sektor ini. Selain itu, perubahan iklim dapat berdampak negatif pada pertanian, seperti banjir, kekeringan, atau peningkatan suhu yang ekstrem. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan praktik pertanian berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim dalam pengembangan sektor pertanian.

Dalam kesimpulannya, pertumbuhan sektor pertanian dapat memiliki efek berantai positif yang signifikan pada perekonomian lokal. Ini mencakup peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja tambahan, pertumbuhan sektor agribisnis, peningkatan daya beli penduduk, investasi lokal dan asing, dan penurunan ketergantungan pada impor. Namun, pengembangan sektor ini harus diiringi oleh pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan upaya untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dalam jangka panjang. Dengan perencanaan yang baik dan dukungan yang tepat, pertumbuhan sektor pertanian dapat menjadi pendorong utama peningkatan ekonomi lokal.

6. *Pergeseran Tenaga Kerja*; Ketika sektor-sektor tertentu berkembang, ada kemungkinan terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor lain. Misalnya, pertumbuhan industri dapat mengakibatkan tenaga kerja dari sektor pertanian beralih ke industri, yang dapat mengangkat angka pengangguran di sektor pertanian.

Pergeseran tenaga kerja adalah fenomena yang terjadi ketika tenaga kerja beralih dari satu sektor ekonomi ke sektor ekonomi lainnya. Ini adalah proses yang kompleks dan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi suatu negara atau wilayah. Pergeseran tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pertumbuhan sektor-sektor tertentu, perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, dan perubahan sosial dan demografis. Dalam konteks pergeseran tenaga kerja, penting untuk memahami bagaimana pergeseran tersebut terjadi, dampaknya pada sektor yang terkena dampak, dan bagaimana pemerintah dan organisasi terkait dapat meresponsnya.

Pergeseran tenaga kerja sering kali terkait dengan pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh, ketika sektor industri atau manufaktur berkembang pesat, sebagian besar tenaga kerja mungkin akan beralih dari sektor pertanian atau sektor jasa ke sektor industri. Ini dapat disebabkan oleh permintaan yang lebih tinggi untuk pekerjaan di sektor industri dan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Pergeseran semacam ini dapat mengakibatkan perubahan signifikan dalam komposisi sektor ekonomi.

Dalam hal ini, sektor pertanian seringkali merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak pergeseran tenaga kerja. Pertumbuhan sektor industri

atau manufaktur biasanya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terampil, dan ini dapat menyebabkan tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di pertanian beralih ke sektor industri. Ini bisa mengangkat angka pengangguran di sektor pertanian karena pekerjaan di sektor pertanian menjadi kurang diminati dan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain.

Pergeseran tenaga kerja juga dapat dipengaruhi oleh faktor teknologi. Kemajuan teknologi di sektor tertentu dapat mengurangi permintaan tenaga kerja manusia. Sebagai contoh, otomatisasi di sektor manufaktur dapat mengurangi kebutuhan akan pekerja pabrik. Dalam situasi seperti ini, pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka di sektor manufaktur mungkin akan mencari pekerjaan di sektor lain, seperti sektor jasa. Namun, mereka mungkin perlu mengubah keterampilan atau mendapatkan pelatihan tambahan untuk dapat bersaing di sektor yang berbeda.

Selain pertumbuhan sektor industri dan perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi pergeseran tenaga kerja. Kebijakan seperti insentif pajak, program pelatihan, dan perlindungan tenaga kerja dapat mempengaruhi keputusan individu dan perusahaan terkait tenaga kerja. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor tertentu, yang dapat mendorong pertumbuhan sektor tersebut dan akibatnya mengubah komposisi tenaga kerja.

Selain itu, perubahan sosial dan demografis juga dapat memengaruhi pergeseran tenaga kerja. Perubahan dalam preferensi pekerjaan, migrasi penduduk, dan pertumbuhan populasi dapat memainkan peran dalam

bagaimana tenaga kerja bergerak antar sektor. Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga merupakan faktor penting dalam memfasilitasi pergeseran tenaga kerja. Pendidikan yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja dapat membantu individu menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi.

Dampak pergeseran tenaga kerja pada sektor yang terkena dampak dapat sangat bervariasi. Di satu sisi, pertumbuhan sektor yang mendapatkan tenaga kerja tambahan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun, di sisi lain, sektor yang mengalami pergeseran tenaga kerja dapat mengalami penurunan dalam jumlah pekerja yang tersedia, yang dapat mengganggu produksi dan pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut. Selain itu, pergeseran tenaga kerja juga dapat memengaruhi upah dan kondisi kerja di berbagai sektor, dengan perubahan yang mungkin menguntungkan atau merugikan pekerja.

Pemerintah dan organisasi terkait sering kali memiliki peran penting dalam mengelola pergeseran tenaga kerja. Mereka dapat merancang kebijakan yang mendukung pekerja yang terdampak dan mendorong pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan keuangan atau insentif untuk perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor yang memerlukan tenaga kerja tambahan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dapat membantu mengelola pergeseran tenaga kerja dengan lebih efektif.

Dalam konteks globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, pergeseran tenaga kerja adalah fenomena yang umum dan terus berlangsung.

terpengaruh harus mencari pekerjaan baru atau mengubah keterampilan mereka untuk memenuhi permintaan baru.

Misalnya, selama resesi ekonomi, sektor manufaktur seringkali mengalami penurunan produksi, yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja massal. Pekerja di sektor ini, seperti pabrik atau industri berat, mungkin menghadapi pengangguran yang tinggi dan kesulitan untuk menemukan pekerjaan lain. Seiring berjalannya waktu, mereka harus memutuskan apakah akan mencari pekerjaan di sektor lain yang tumbuh atau berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan baru untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi juga dapat menciptakan peluang baru dalam sektor-sektor yang sedang berkembang. Ketika teknologi baru muncul atau perubahan dalam preferensi konsumen terjadi, sektor ekonomi yang lebih baru dan inovatif mungkin muncul, seperti teknologi informasi, energi terbarukan, atau layanan kesehatan. Pekerja yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini dan memperoleh keterampilan yang relevan akan memiliki lebih banyak peluang pekerjaan.

Namun, perubahan sektor ekonomi juga dapat menciptakan gejolak dalam pasar tenaga kerja. Pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan sektor yang berkembang mungkin kesulitan untuk bersaing dan berisiko mengalami pengangguran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam memberikan pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk membantu pekerja beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk merekrut atau mempertahankan pekerja. Ketika perusahaan merasa tidak yakin tentang perkiraan permintaan masa depan, mereka cenderung bersikap berhati-hati dalam merekrut pekerja baru. Ini dapat mengakibatkan penurunan tingkat perekrutan dan mungkin juga pemangkasan pekerjaan. Akibatnya, angka pengangguran dapat meningkat.

Pada tingkat individu, ketidakpastian ekonomi dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan pada pekerja. Mereka mungkin mengalami stres, ketidakpastian, dan ketakutan kehilangan pekerjaan mereka. Pekerja mungkin merasa perlu untuk lebih fleksibel dalam pekerjaan mereka dan terus memperbarui keterampilan mereka agar tetap relevan di pasar tenaga kerja yang berubah dengan cepat.

Selain itu, perubahan ekonomi juga dapat memengaruhi penghasilan pekerja. Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menaikkan gaji atau memberikan insentif finansial kepada pekerja. Kondisi ini dapat menyebabkan stagnasi upah, yang berarti bahwa pekerja tidak mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi juga dapat memengaruhi keputusan pendidikan pekerja. Ketika ekonomi tidak stabil, beberapa pekerja mungkin menunda atau bahkan membatalkan rencana untuk mengikuti pendidikan tambahan atau pengembangan keterampilan karena mereka khawatir tentang dampak finansial jangka pendek. Ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi jangka panjang.

Sektor ekonomi yang paling rentan terhadap ketidakpastian ekonomi adalah sektor yang terkait erat dengan perubahan siklus ekonomi, seperti sektor konstruksi, manufaktur, dan perdagangan. Dalam sektor-sektor ini, fluktuasi dalam permintaan dan penawaran dapat menghasilkan tingkat pengangguran yang signifikan selama periode ketidakpastian ekonomi.

Untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi dan dampaknya terhadap angka pengangguran, perlu ada tindakan dan kebijakan yang bijaksana. Salah satu pendekatan adalah investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan pekerja untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dan transferable. Selain itu, program-program dukungan sementara, seperti jaring pengaman sosial, dapat membantu pekerja yang terkena dampak perubahan ekonomi.

Selain itu, pemerintah dapat berperan dalam merangsang pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil dan berkembang, seperti sektor berbasis pengetahuan, teknologi, atau layanan. Ini dapat menciptakan peluang pekerjaan yang lebih tahan terhadap ketidakpastian ekonomi.

Penting juga untuk meningkatkan kesiapan dan ketangguhan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan. Pekerja harus diberikan akses ke pendidikan dan pelatihan yang relevan sehingga mereka dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ekonomi. Lebih penting lagi, kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan lembaga pendidikan harus didorong untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Ketidakpastian ekonomi adalah faktor yang tidak dapat dihindari dalam dunia ekonomi yang terus berubah. Namun, dengan perencanaan yang tepat,

pengelolaan krisis, dan investasi dalam sumber daya manusia, dampak negatifnya pada angka pengangguran dapat diminimalkan, dan peluang untuk beradaptasi dan berkembang dapat ditingkatkan. Kesadaran dan tindakan yang bijaksana di tingkat individu, perusahaan, dan pemerintah sangat penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan menjaga ketahanan tenaga kerja.

8. *Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja*; Pertumbuhan sektor tertentu dapat memengaruhi tingkat partisipasi tenaga kerja. Jika lebih banyak orang masuk ke pasar kerja, ini dapat memengaruhi angka pengangguran terlepas dari pertumbuhan sektor-sektor tertentu.

Tingkat partisipasi tenaga kerja adalah salah satu parameter penting dalam analisis ketenagakerjaan suatu negara atau wilayah. Ini mengacu pada persentase dari populasi usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar kerja, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi tenaga kerja yang tinggi dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat, sementara tingkat yang rendah dapat menunjukkan berbagai masalah ekonomi, seperti pengangguran atau ketidaksetaraan gender dalam kesempatan kerja. Faktanya, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu dapat memiliki dampak besar pada tingkat partisipasi tenaga kerja, dan ini dapat membentuk tren yang signifikan dalam ekonomi.

Pertumbuhan sektor ekonomi tertentu memiliki dampak beragam pada tingkat partisipasi tenaga kerja. Sebagai contoh, pertumbuhan sektor pertanian seringkali mendorong peningkatan partisipasi tenaga kerja di daerah pedesaan. Ketika sektor pertanian berkembang, petani tambahan atau

pekerja musiman mungkin dibutuhkan untuk mengatasi tugas-tugas pertanian seperti penanaman, panen, dan perawatan tanaman. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat partisipasi tenaga kerja di sektor pertanian. Di sisi lain, pertumbuhan sektor industri dan manufaktur cenderung mempengaruhi tingkat partisipasi tenaga kerja di daerah perkotaan. Sektor ini seringkali membutuhkan tenaga kerja terampil untuk berbagai pekerjaan, termasuk produksi, manajemen, dan layanan pendukung. Sebagai hasilnya, pertumbuhan sektor industri dapat menarik lebih banyak pekerja untuk memasuki pasar kerja di wilayah perkotaan.

Tingkat partisipasi tenaga kerja juga dipengaruhi oleh sektor jasa, yang meliputi berbagai bidang seperti perdagangan, perbankan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sektor jasa seringkali membutuhkan beragam tingkat kualifikasi dan menyediakan berbagai peluang pekerjaan. Pertumbuhan sektor jasa dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dalam berbagai peran, termasuk pekerja administratif, guru, dokter, dan banyak lagi.

Selain pertumbuhan sektor ekonomi, faktor-faktor lain juga memengaruhi tingkat partisipasi tenaga kerja. Kebijakan pemerintah, tingkat pendidikan, faktor demografi, dan perubahan sosial juga memiliki dampak besar pada tingkat partisipasi tenaga kerja. Kebijakan pemerintah yang mendukung pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong partisipasi yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi cenderung meningkatkan peluang pekerjaan, sementara faktor demografi seperti pertumbuhan penduduk dan perubahan dalam struktur usia dapat memengaruhi jumlah orang yang memasuki pasar kerja.

Selain itu, faktor sosial seperti norma gender dan peran dalam keluarga juga memainkan peran penting dalam tingkat partisipasi tenaga kerja. Dalam beberapa kasus, norma sosial dapat membatasi akses perempuan ke pasar kerja, sementara perubahan dalam norma sosial dapat membuka peluang baru bagi partisipasi tenaga kerja yang lebih luas.

Faktor ekonomi juga merupakan pengaruh kuat. Tingkat upah, stabilitas ekonomi, dan tingkat pengangguran saat ini dapat memengaruhi keputusan individu untuk bergabung atau keluar dari pasar kerja. Tingkat upah yang tinggi atau stabilitas ekonomi dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi, sedangkan tingkat pengangguran yang tinggi atau ketidakpastian ekonomi dapat membuat orang enggan memasuki pasar kerja.

Tingkat partisipasi tenaga kerja juga berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mungkin untuk terlibat dalam pasar kerja. Mereka sering memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan yang membayar lebih baik dan menawarkan peluang karir yang lebih menjanjikan. Namun, masalah akses ke pendidikan berkualitas dan ketidaksetaraan pendidikan dapat menjadi hambatan bagi partisipasi yang lebih luas.

Selain faktor-faktor tersebut, perubahan dalam teknologi juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi tenaga kerja. Kemajuan teknologi dan otomatisasi dapat menggantikan beberapa pekerjaan manusia, sementara pada saat yang sama, menciptakan permintaan akan pekerjaan baru yang berhubungan dengan teknologi. Ini dapat mengubah lanskap pekerjaan dan memengaruhi siapa yang masuk ke pasar kerja dan di sektor apa.

Penting untuk diingat bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja bukanlah satu-satunya indikator yang relevan dalam analisis ketenagakerjaan. Angka pengangguran, tingkat upah, tingkat ketidaksetaraan, dan berbagai faktor lain juga berperan dalam memberikan gambaran yang lengkap tentang kesehatan pasar kerja suatu negara atau wilayah. Selain itu, tren dalam tingkat partisipasi tenaga kerja seringkali dapat memberikan wawasan tentang perkembangan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam suatu masyarakat.

9. Efisiensi Tenaga Kerja; Penyerapan tenaga kerja dapat memengaruhi efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Sektoralisasi tenaga kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas, sementara penyerapan tenaga kerja yang tidak efisien dapat menurunkan produktivitas dan berpotensi mengganggu tingkat pengangguran.

Efisiensi tenaga kerja adalah faktor kunci dalam ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penyerapan tenaga kerja yang baik merupakan hal penting untuk memastikan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Ketika tenaga kerja terserap dengan baik, artinya mereka memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan mereka, ini dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja yang tidak efisien dapat menurunkan produktivitas dan berpotensi mengganggu tingkat pengangguran.

Sektoralisasi tenaga kerja adalah salah satu aspek penting dalam penyerapan tenaga kerja. Ini mengacu pada distribusi tenaga kerja ke berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, dan jasa. Peningkatan sektoralisasi

tenaga kerja yang efisien dapat meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, ketika tenaga kerja dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi sektor-sektor tertentu, ini dapat meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika sektoralisasi tenaga kerja tidak sesuai atau tidak efisien, dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dan permintaan pasar kerja. Penting untuk memahami bagaimana penyerapan tenaga kerja dan sektoralisasi tenaga kerja berinteraksi dalam konteks efisiensi ekonomi. Ketika penyerapan tenaga kerja cocok dengan kebutuhan sektor ekonomi, ini dapat menciptakan sinergi positif. Sebaliknya, ketidakcocokan antara penyerapan tenaga kerja dan sektoralisasi dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi dan ketidakstabilan. Sebagai contoh, jika terdapat surplus pekerja di sektor tertentu, ini dapat mengakibatkan penurunan upah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Di sisi lain, kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor kunci dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Efisiensi penyerapan tenaga kerja juga berkaitan dengan penggunaan keterampilan tenaga kerja. Ketika tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, ini dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Sebaliknya, ketika terdapat kesenjangan dalam keterampilan tenaga kerja, ini dapat menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penyerapan tenaga kerja.

Dalam konteks globalisasi, penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh mobilitas tenaga kerja. Mobilitas tenaga kerja dapat membantu memecahkan ketidakcocokan antara penyerapan tenaga kerja dan sektoralisasi. Namun, mobilitas tenaga kerja yang tidak efisien atau terhambat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tingkat pengangguran.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja yang efisien dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Ketika lebih banyak orang memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang layak, ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi tekanan pada program kesejahteraan sosial. Namun, penyerapan tenaga kerja yang buruk dapat mengakibatkan kemiskinan dan ketimpangan yang lebih tinggi.

Kebijakan pemerintah memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi penyerapan tenaga kerja. Pemerintah dapat mengambil berbagai langkah untuk memfasilitasi penyerapan tenaga kerja yang efisien, seperti mempromosikan pendidikan dan pelatihan yang relevan, membantu penyesuaian tenaga kerja dengan perubahan pasar kerja, dan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah juga perlu memonitor dan mengevaluasi efisiensi penyerapan tenaga kerja secara berkala untuk memahami dinamika pasar kerja dan membuat penyesuaian yang sesuai dalam kebijakan ekonomi. Kemitraan antara sektor swasta, pemerintah, dan lembaga pendidikan juga dapat membantu dalam mengarahkan tenaga kerja ke sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan.

Dalam rangka mencapai efisiensi ekonomi yang optimal, penting untuk memahami kompleksitas hubungan antara penyerapan tenaga kerja, sektoralisasi, penggunaan keterampilan, mobilitas tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah. Efisiensi penyerapan tenaga kerja yang baik dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan tingkat pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, hal ini merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan ekonomi dan pembangunan.

10. *Pengaruh Faktor Eksternal*; Faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas atau perubahan permintaan global juga dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja dan angka pengangguran di Kabupaten Konawe.

Faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas atau perubahan permintaan global memiliki dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan angka pengangguran di Kabupaten Konawe, Indonesia. Kabupaten Konawe adalah wilayah dengan mayoritas mata pencaharian terkait sektor pertanian dan pertambangan. Oleh karena itu, fluktuasi harga komoditas dan perubahan permintaan global memiliki pengaruh yang mendalam pada perekonomian dan ketenagakerjaan di wilayah ini.

Fluktuasi harga komoditas, seperti harga minyak, nikel, dan produk pertanian, dapat berdampak langsung pada pekerja di Kabupaten Konawe. Ketika harga komoditas naik, sektor pertambangan dan pertanian biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini mendorong peningkatan investasi dan ekspansi sektor-selar terkait. Dalam hal ini, penyerapan tenaga kerja dapat meningkat, karena perusahaan

mempekerjakan lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Ini dapat mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Namun, fluktuasi harga komoditas juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Ketika harga komoditas turun, terutama jika terjadi penurunan drastis, perusahaan pertambangan dan pertanian mungkin terpaksa mengurangi produksi atau menutup operasi mereka. Dalam situasi ini, jumlah pekerja yang terlibat dalam sektor ini dapat mengalami pemotongan. Ini dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Konawe, karena pekerja kehilangan pekerjaan mereka.

Selain fluktuasi harga komoditas, perubahan permintaan global juga memengaruhi dinamika ketenagakerjaan di wilayah ini. Permintaan global yang tinggi untuk komoditas tertentu, seperti nikel, mungkin mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Kabupaten Konawe. Hal ini berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja, karena perusahaan-perusahaan di sektor tersebut akan membutuhkan lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan global yang tinggi.

Namun, ketika permintaan global berkurang, seperti akibat resesi ekonomi di wilayah mitra perdagangan, Kabupaten Konawe dapat merasakan dampaknya. Penurunan permintaan global dapat menyebabkan penurunan produksi dan, sebagai akibatnya, penurunan penyerapan tenaga kerja. Pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka mungkin sulit untuk menemukan pekerjaan pengganti, sehingga angka pengangguran dapat meningkat.

Pengaruh faktor eksternal ini juga dapat memiliki efek domino yang lebih luas di Kabupaten Konawe. Penurunan pendapatan di sektor pertanian dan pertambangan dapat mengurangi daya beli masyarakat setempat, mempengaruhi sektor perdagangan dan jasa. Ini juga dapat memengaruhi akses pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta infrastruktur dan perkembangan sosial lainnya di wilayah tersebut.

Selain itu, perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional, seperti tarif dan perjanjian perdagangan, dapat memengaruhi daya saing produk-produk Kabupaten Konawe di pasar global. Jika terjadi perubahan yang merugikan, ekspor produk lokal dapat terganggu, yang pada gilirannya dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan pertambangan.

Dalam konteks Kabupaten Konawe, di mana sektor pertanian dan pertambangan menjadi tulang punggung ekonomi, penting untuk memahami dan mengelola dampak faktor eksternal ini dengan bijak. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan ekonomi dan melindungi pekerja dari fluktuasi ekonomi yang tiba-tiba. Diversifikasi ekonomi ke sektor lain juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi eksternal. Selain itu, pelatihan dan pendidikan yang relevan dapat membantu pekerja dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi global.

11. *Dampak Lingkungan*; Pertumbuhan sektor tertentu dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Ini bisa mencakup deforestasi, polusi, atau

penurunan kualitas air, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesejahteraan penduduk dan tingkat pengangguran jika sumber daya alam berkurang.

Pertumbuhan sektor tertentu dalam perekonomian dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan alamiah. Hal ini terutama terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, deforestasi, polusi, dan penurunan kualitas air. Dampak-dampak ini dapat berdampak luas dan mendalam pada ekosistem, manusia, dan perekonomian secara keseluruhan.

Deforestasi adalah salah satu dampak lingkungan yang paling mencolok dan merugikan akibat pertumbuhan sektor tertentu. Penggundulan hutan untuk memberikan ruang bagi pertanian, perkebunan, atau industri kayu sering kali menghancurkan habitat alamiah, mengurangi keragaman hayati, dan berkontribusi pada perubahan iklim. Hilangnya hutan juga mempengaruhi siklus air, mengakibatkan banjir dan kekeringan yang lebih sering terjadi.

Penurunan kualitas air adalah masalah serius yang dapat diakibatkan oleh sektor-sektor yang menghasilkan polusi air. Limbah industri, pertanian berlebihan, dan peningkatan urbanisasi dapat mencemari sungai, danau, dan perairan lainnya. Ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem air, mengganggu ketahanan pangan lokal, dan membahayakan kesehatan manusia yang bergantung pada sumber air tersebut.

Polusi udara juga merupakan konsekuensi negatif dari pertumbuhan sektor tertentu. Industri dan transportasi dapat menghasilkan emisi polutan udara

yang mencakup partikel berbahaya dan senyawa kimia seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Polusi udara ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, berkontribusi pada perubahan iklim, dan merusak tanaman dan hewan.

Selain itu, pertumbuhan sektor industri tertentu seringkali memerlukan penggunaan energi fosil seperti minyak bumi, batubara, dan gas alam. Hal ini berkontribusi pada emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Perubahan iklim dapat memiliki dampak besar, seperti peningkatan suhu rata-rata, cuaca ekstrem yang lebih sering, dan kenaikan permukaan laut.

Dampak lingkungan dari pertumbuhan sektor tertentu juga dapat menciptakan dampak sekunder yang signifikan. Misalnya, penurunan kualitas air dapat mengganggu produksi pertanian dan perikanan lokal, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan ketahanan pangan penduduk. Demikian pula, kerusakan habitat alamiah seperti hutan dapat mengurangi kemampuan ekosistem untuk menyediakan layanan ekosistem, seperti penyerapan karbon dan perlindungan terhadap bencana alam.

Untuk mengatasi dampak lingkungan ini, penting untuk menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini termasuk penggunaan teknologi bersih, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam. Upaya konservasi dan restorasi lingkungan, serta kerjasama global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, juga

merupakan bagian integral dalam mengurangi dampak negatif sektor-sektor ekonomi terhadap lingkungan. Dengan demikian, penting bagi negara dan komunitas internasional untuk bekerja sama dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

12. *Kesenjangan Sosial*; Penyerapan tenaga kerja sektoral dapat mempengaruhi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Jika sektor-sektor tertentu memberikan peluang kerja yang lebih baik kepada kelompok tertentu, ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam pendapatan dan pekerjaan.

Penyerapan tenaga kerja sektoral merupakan faktor yang signifikan dalam membentuk dan memengaruhi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ketika sektor-sektor ekonomi tertentu memberikan peluang kerja yang lebih baik kepada kelompok tertentu, ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam pendapatan, pekerjaan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Perbedaan dalam penyerapan tenaga kerja sektoral dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks ini, kita akan menguraikan secara mendalam dampak dari penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Perlu dipahami bahwa beragam sektor ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal tipe pekerjaan, tingkat upah, tingkat kualifikasi yang diperlukan, serta kesempatan karir. Dalam sektor-sektor tertentu, seperti sektor manufaktur atau teknologi informasi, pekerjaan cenderung

membutuhkan kualifikasi tinggi dan pengetahuan teknis yang mungkin tidak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Ini bisa mengakibatkan ketidaksetaraan akses ke pekerjaan yang berbayar tinggi, meningkatkan kesenjangan pendapatan.

Kesenjangan sosial juga dapat berkembang ketika sektor-sektor tertentu lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Misalnya, sektor pertanian seringkali lebih rentan terhadap musim dan perubahan cuaca, yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan pendapatan bagi pekerja sektor ini. Ini berarti bahwa sektor-sektor yang lebih stabil, seperti sektor layanan atau sektor manufaktur, mungkin memberikan stabilitas ekonomi yang lebih besar kepada pekerja mereka dan akhirnya mengurangi kesenjangan sosial.

Faktor sosial dan budaya juga berperan penting dalam membentuk kesenjangan sosial. Di banyak masyarakat, pekerjaan dalam sektor tertentu dapat diasosiasikan dengan status sosial atau budaya yang lebih tinggi. Misalnya, pekerjaan di sektor jasa profesional sering dianggap lebih bergengsi daripada pekerjaan di sektor pertanian. Ini dapat menciptakan kesenjangan sosial dalam pandangan masyarakat dan dapat memengaruhi aspirasi dan pilihan karir individu.

Selanjutnya, kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan juga dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektoral dan kesenjangan sosial. Kebijakan yang mendukung pendidikan dan pelatihan dalam sektor-sektor tertentu dapat membantu menciptakan peluang pekerjaan yang lebih baik dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Di sisi lain, kebijakan yang

menghambat akses ke pekerjaan tertentu, seperti diskriminasi dalam upah atau kesempatan pekerjaan, dapat memperburuk kesenjangan sosial.

Sistem pendidikan juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja sektoral. Jika sistem pendidikan tidak menghasilkan individu yang siap kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor tertentu, maka kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat meningkat. Ini dapat menyebabkan kelompok tertentu memiliki akses lebih baik ke peluang pekerjaan dibandingkan dengan kelompok lain, yang memperkuat kesenjangan sosial.

Pengaruh penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap kesenjangan sosial juga terlihat dalam mobilitas sosial. Sebagian besar sektor ekonomi menawarkan kesempatan mobilitas sosial yang berbeda. Sebagai contoh, sektor-sektor tertentu mungkin memberikan lebih banyak peluang promosi dan perkembangan karir daripada yang lain. Jika kelompok tertentu memiliki akses lebih besar ke sektor-sektor ini, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka, sementara kelompok lain mungkin terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Selain itu, ketika sektor-sektor tertentu mengalami perkembangan yang pesat, seperti sektor teknologi atau keuangan, mereka mungkin menarik lebih banyak tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai, dan ini dapat mengakibatkan perebutan tenaga kerja yang meningkat. Kelompok yang memiliki keterampilan ini akan mendapatkan upah yang lebih tinggi,

sementara kelompok lain yang kurang terampil mungkin tertinggal dalam hal pendapatan dan pekerjaan yang stabil.

Adanya kesenjangan dalam penyerapan tenaga kerja sektoral dapat memengaruhi mobilitas sosial di masyarakat. Kelompok yang kurang beruntung dalam hal akses ke sektor-sektor ekonomi yang berkembang dengan baik mungkin menghadapi kesulitan dalam meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Ini, pada gilirannya, dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Selain faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan, kesenjangan sosial dalam penyerapan tenaga kerja sektoral juga dapat dipengaruhi oleh geografi dan perkembangan regional. Sebagian besar negara memiliki sektor ekonomi yang lebih dominan di beberapa wilayah daripada yang lain. Pada saat yang sama, beberapa wilayah mungkin memiliki infrastruktur dan akses yang lebih baik ke sektor-sektor tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan antara wilayah dalam hal lapangan kerja, pendapatan, dan kemajuan ekonomi.

Dalam beberapa kasus, penyerapan tenaga kerja sektoral yang tidak merata dapat menciptakan ketegangan sosial dan masalah sosial lainnya. Ketika kelompok tertentu merasa bahwa mereka tidak memiliki akses yang adil ke peluang pekerjaan, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan, ketidakstabilan sosial, dan bahkan konflik dalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada perhatian khusus terhadap kebijakan yang mempromosikan inklusivitas, keadilan, dan akses yang setara ke peluang pekerjaan di berbagai sektor ekonomi.

Selanjutnya, penyerapan tenaga kerja sektoral juga dapat berdampak pada kesenjangan gender. Beberapa sektor ekonomi mungkin memiliki sejarah yang cenderung menguntungkan satu jenis kelamin dibandingkan dengan yang lain. Misalnya, sektor konstruksi seringkali didominasi oleh pria, sementara sektor kesehatan dan pendidikan lebih sering diisi oleh wanita. Ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam pendapatan dan akses ke peluang pekerjaan antara pria dan wanita. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial juga harus memperhatikan kesenjangan gender.

Pengaruh penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap kesenjangan sosial juga dapat tercermin dalam kualitas pekerjaan yang tersedia. Beberapa sektor ekonomi mungkin menawarkan pekerjaan dengan keamanan kerja yang lebih baik, tunjangan, dan jaminan kesejahteraan yang lebih besar daripada sektor lain. Ini akan menciptakan kesenjangan dalam kualitas hidup, keamanan ekonomi, dan kesejahteraan antara pekerja di berbagai sektor. Perbedaan dalam tunjangan kesejahteraan dan keamanan ekonomi juga dapat menciptakan kesenjangan dalam akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, perubahan dalam dinamika ekonomi global juga dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektoral dan kesenjangan sosial. Misalnya, perkembangan teknologi dan globalisasi dapat menyebabkan perubahan cepat dalam permintaan tenaga kerja di berbagai sektor. Sebagian besar sektor ekonomi saat ini mengalami perubahan signifikan

dalam hal otomatisasi dan digitalisasi, yang dapat memengaruhi jenis pekerjaan yang tersedia dan keterampilan yang diperlukan.

Di samping itu, krisis ekonomi atau situasi khusus, seperti pandemi COVID-19, juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja sektoral dan kesenjangan sosial. Krisis ekonomi dapat mengurangi peluang pekerjaan di beberapa sektor dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Hal ini khususnya memengaruhi kelompok yang lebih rentan ekonominya dan dapat memperburuk kesenjangan sosial.

Penting untuk mencatat bahwa ketidaksetaraan dalam penyerapan tenaga kerja sektoral tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi. Kesenjangan sosial juga mencakup dimensi lain, seperti kesenjangan dalam pendidikan, kesehatan, akses ke layanan publik, dan partisipasi politik. Semua ini terkait erat dengan penyerapan tenaga kerja sektoral dan peran pentingnya dalam membentuk struktur sosial masyarakat.

Untuk mengatasi kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan dalam penyerapan tenaga kerja sektoral, diperlukan serangkaian tindakan dan kebijakan yang terencana dengan baik. Pertama, perlu diberikan prioritas pada pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan individu untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan berbagai sektor ekonomi. Pendidikan vokasional, pelatihan, dan pengembangan keterampilan dapat membantu meningkatkan mobilitas pekerjaan dan mengurangi kesenjangan.

Kemudian, kebijakan yang mendorong kerja sama antara sektor swasta, publik, dan nirlaba dalam mempromosikan peluang pekerjaan dan

pengembangan ekonomi di berbagai sektor sangat penting. Ini dapat mencakup insentif fiskal, dukungan bagi usaha kecil dan menengah, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu.

Selain itu, kebijakan yang mendorong inklusivitas dan kesetaraan di tempat kerja juga penting. Ini mencakup langkah-langkah anti-diskriminasi, akses yang setara ke peluang karir, serta dukungan bagi kelompok yang lebih rentan dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam beberapa kasus, program-program afirmatif atau kuota dapat digunakan untuk memastikan akses yang adil bagi kelompok yang kurang beruntung.

Pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada masyarakat juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Ini mencakup promosi pertanian berkelanjutan, industri berkelanjutan, dan energi terbarukan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kualitas hidup di berbagai wilayah. Pemberdayaan ekonomi lokal dan pengurangan ketidaksetaraan regional juga harus menjadi prioritas dalam mengatasi kesenjangan sosial.

Selain itu, penting untuk memonitor dan mengevaluasi dampak kebijakan dan tindakan yang diambil untuk mengurangi kesenjangan sosial akibat penyerapan tenaga kerja sektoral. Evaluasi yang baik akan membantu memahami efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

Dalam kesimpulan, penyerapan tenaga kerja sektoral memiliki dampak yang signifikan pada kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dengan

memahami secara mendalam peran sektor-sektor ekonomi, kebijakan yang tepat dapat dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam akses pekerjaan, pendapatan, kualitas hidup, dan kesempatan karir. Memerangi kesenjangan sosial adalah tantangan yang kompleks, namun upaya yang tepat dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

13. *Pemberdayaan Perempuan*; Dampak penyerapan tenaga kerja terhadap pengangguran juga dapat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Sektor tertentu mungkin memberikan lebih banyak peluang kerja bagi Perempuan, yang dapat mempengaruhi angka pengangguran dalam populasi perempuan.

Pemberdayaan perempuan merupakan isu krusial dalam konteks penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Pemahaman yang mendalam mengenai dampak penyerapan tenaga kerja terhadap pengangguran perempuan melibatkan banyak aspek, termasuk kesetaraan gender, keterlibatan perempuan di berbagai sektor ekonomi, dan faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja.

Peran perempuan dalam ekonomi telah berubah secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Mereka tidak hanya berperan dalam pekerjaan rumah tangga, tetapi juga semakin terlibat dalam sektor-sektor ekonomi lainnya. Sebagian besar perempuan telah mengakses pendidikan lebih tinggi, sehingga memiliki peluang kerja yang lebih luas. Meskipun

demikian, masih ada beberapa tantangan dalam upaya pemberdayaan perempuan yang berdampak pada angka pengangguran perempuan.

Dalam beberapa sektor, seperti sektor jasa, perempuan dapat memiliki peluang kerja yang lebih baik, namun sering kali dengan upah yang lebih rendah daripada laki-laki. Ini mencerminkan isu ketidaksetaraan upah yang perlu diatasi. Di sisi lain, di sektor pertanian, perempuan mungkin memiliki peran yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang, tetapi seringkali dalam kondisi kerja yang tidak stabil dan tidak diakui.

Pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan, tetapi hal ini memerlukan akses yang lebih baik terhadap sumber daya, pelatihan, dan pendanaan. Sebagai tambahan, aspek kesetaraan gender dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di sektor pertanian juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan perempuan.

Ketika mempertimbangkan dampak penyerapan tenaga kerja terhadap pengangguran perempuan, penting untuk melihat faktor-faktor sosial yang memengaruhi partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Perempuan sering kali memiliki tanggung jawab ganda, yaitu tugas rumah tangga dan pekerjaan luar rumah. Ini dapat menjadi hambatan bagi mereka dalam mencari pekerjaan, terutama sektor dengan jam kerja yang panjang.

Tingkat pendidikan dan pelatihan juga memainkan peran kunci. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan dapat membantu perempuan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor yang memerlukan tenaga kerja yang

terampil. Namun, akses yang sama terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan seringkali masih menjadi isu yang perlu diatasi.

Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam hal kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, perlindungan hak-hak perempuan, dan pemutusan diskriminasi gender sangat penting. Inisiatif yang mendorong perusahaan dan sektor swasta untuk mengadopsi praktik-praktik yang mendukung perempuan dalam dunia kerja juga diperlukan.

Dampak penyerapan tenaga kerja terhadap pengangguran perempuan melibatkan kerumitan isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya. Kesetaraan gender, akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang, serta dukungan pemberdayaan perempuan adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam upaya mengurangi pengangguran perempuan dan mencapai inklusi ekonomi yang lebih baik.

Dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan mengurangi angka pengangguran perempuan, perlu ada upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ini mencakup perubahan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, investasi dalam pendidikan dan pelatihan perempuan, serta mempromosikan budaya kerja yang inklusif dan mendukung perempuan dalam mencapai potensi penuh mereka di pasar tenaga kerja.

Demikianlah, pemahaman yang mendalam tentang dampak penyerapan tenaga kerja terhadap pengangguran perempuan adalah esensial untuk mengatasi tantangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

di dunia kerja. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan dalam mencapai kesuksesan ekonomi dan mengurangi ketimpangan gender dalam angka pengangguran.

14. *Dampak Demografi*: Faktor demografi, seperti pertumbuhan penduduk dan tingkat kelahiran di Kabupaten Konawe, juga dapat memengaruhi angka pengangguran. Jika populasi tumbuh lebih cepat daripada penyerapan tenaga kerja, ini dapat meningkatkan angka pengangguran.

Dampak demografi merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap angka pengangguran di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Faktor-faktor demografi, seperti pertumbuhan penduduk dan tingkat kelahiran, memiliki keterkaitan yang erat dengan isu pengangguran di wilayah ini, dan pemahaman mendalam tentang hal ini menjadi sangat penting dalam upaya pengembangan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Pertumbuhan penduduk adalah faktor kunci yang berdampak langsung pada angka pengangguran. Jika populasi tumbuh lebih cepat daripada penyerapan tenaga kerja, hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Di Kabupaten Konawe, pertumbuhan penduduk selama beberapa tahun terakhir telah meningkat dan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi isu pengangguran. Penyebab pertumbuhan ini dapat melibatkan beberapa faktor, termasuk laju kelahiran yang tinggi, imigrasi, dan migrasi penduduk dari wilayah lain.

Salah satu aspek penting dalam analisis dampak demografi adalah tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran yang tinggi di wilayah ini dapat menghasilkan tambahan penduduk yang lebih besar, terutama jika tingkat kelahiran tersebut melebihi tingkat penyerapan tenaga kerja dalam sektor ekonomi. Peningkatan angka kelahiran dapat menyebabkan lebih banyak generasi muda yang memasuki pasar kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan persaingan untuk pekerjaan yang terbatas.

Selain itu, struktur usia penduduk juga merupakan faktor penting dalam menganalisis dampak demografi. Kabupaten Konawe, seperti wilayah lainnya, memiliki piramida penduduk yang menunjukkan sebagian besar populasi berusia muda. Dalam konteks ketenagakerjaan, ini berarti ada lebih banyak individu yang memasuki usia kerja (umumnya antara 15-64 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sudah memasuki usia pensiun. Dengan banyaknya generasi muda yang siap memasuki pasar tenaga kerja, persaingan menjadi lebih sengit, dan pemerintah daerah perlu menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap tenaga kerja ini.

Tingkat migrasi juga dapat memengaruhi pertumbuhan penduduk dan angka pengangguran di Kabupaten Konawe. Jika banyak penduduk dari wilayah lain bermigrasi ke kabupaten ini dalam pencarian pekerjaan, ini dapat meningkatkan tekanan pada pasar tenaga kerja. Di sisi lain, migrasi keluar dari Kabupaten Konawe untuk mencari pekerjaan di tempat lain juga dapat memengaruhi tingkat pengangguran lokal.

Sumber daya manusia adalah faktor penting yang harus diperhitungkan dalam kaitannya dengan dampak demografi. Ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan sektor ekonomi lokal dapat mempengaruhi sejauh mana pengangguran dapat ditekan. Jika penduduk muda Kabupaten Konawe memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang sesuai, ini dapat mengurangi tingkat pengangguran karena lebih banyak individu yang siap memasuki pekerjaan yang tersedia.

Namun, faktor ini bisa berfungsi sebagai *double-edged sword*. Jika penduduk muda memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi tetapi jumlah lapangan kerja yang sesuai tidak mencukupi, ini dapat menyebabkan *underemployment*, di mana pekerja memiliki kualifikasi yang lebih tinggi tetapi hanya bisa mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Hal ini juga dapat mengakibatkan kemacetan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor-sektor tertentu.

Perubahan demografi seperti peningkatan harapan hidup juga berdampak. Jika penduduk hidup lebih lama, ada kemungkinan bahwa lebih banyak orang akan tetap berada di pasar tenaga kerja untuk periode yang lebih lama, sehingga menciptakan persaingan tambahan untuk pekerjaan yang ada. Sementara ini mungkin menguntungkan dari segi pengalaman dan pengetahuan, ini juga dapat menutup peluang bagi generasi muda untuk memasuki pasar kerja.

Kemudian, dapat ditemui perbedaan dalam tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran antara daerah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Konawe. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi seringkali terkonsentrasi di daerah perkotaan karena daya tarik pekerjaan dan akses ke fasilitas pendidikan yang lebih baik. Ini dapat menyebabkan urbanisasi yang lebih besar dan peningkatan tekanan pada infrastruktur perkotaan dan layanan publik.

Selain itu, perbedaan demografi dalam hal jenis kelamin juga memiliki dampak yang signifikan pada angka pengangguran. Jika ada ketidakseimbangan antara jumlah pria dan wanita di pasar tenaga kerja, ini dapat memengaruhi pengangguran dan gaji. Selain itu, perbedaan dalam tingkat pendidikan dan pelatihan antara jenis kelamin juga bisa berperan dalam pengangguran dan keterlibatan dalam sektor ekonomi tertentu.

Selanjutnya, perubahan demografi juga bisa mempengaruhi pola konsumsi dan permintaan di Kabupaten Konawe. Jika populasi mendominasi kelompok usia tertentu, seperti generasi muda, ini dapat menciptakan peluang bagi sektor-sektor yang melayani kebutuhan mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Di sisi lain, jika ada peningkatan jumlah penduduk yang menua, ini dapat mengarah pada peningkatan permintaan layanan kesehatan dan sosial.

Perlu dicatat bahwa dampak demografi terhadap pengangguran dapat berinteraksi dengan faktor-faktor lain, seperti kondisi ekonomi nasional,

investasi sektor ekonomi, kebijakan pemerintah, dan teknologi. Misalnya, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan manufaktur bisa berbeda dibandingkan dengan sektor jasa, dan perubahan dalam teknologi dan otomatisasi juga dapat memengaruhi jenis pekerjaan yang tersedia.

Pentingnya mengakui dampak demografi terletak pada peranannya dalam membentuk tren pengangguran dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mengatasi isu ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara faktor-faktor demografi dan pengangguran, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualifikasi tenaga kerja, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Konawe.

15. *Sosialisasi dan Pendidikan*; Dampak penyerapan tenaga kerja sektoral juga dapat berhubungan dengan peran pendidikan dan sosialisasi dalam Masyarakat di Kabupaten Konawe. Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan sektor-sektor berkembang dapat membantu mengurangi pengangguran.

Dampak penyerapan tenaga kerja sektoral dan peran pendidikan serta sosialisasi di Kabupaten Konawe memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks pembangunan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran. Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan sektor-sektor berkembang berperan penting dalam meningkatkan kualifikasi tenaga kerja,

mengurangi pengangguran, dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan memainkan peran sentral dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral. Kabupaten Konawe harus memastikan bahwa sistem pendidikan lokalnya berfokus pada menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan sektor-sektor ekonomi yang berkembang. Ini membutuhkan kerja sama erat antara lembaga pendidikan, perusahaan, dan pemerintah daerah untuk memahami tren pasar tenaga kerja dan mengintegrasikan kebutuhan sektor-sektor tersebut ke dalam kurikulum pendidikan. Ini dapat mencakup pengembangan program pelatihan kejuruan, kursus sertifikasi, dan magang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang dapat diaplikasikan langsung dalam lingkungan kerja. Sosialisasi juga memegang peran penting dalam menginformasikan masyarakat tentang peluang karir di sektor-sektor tertentu dan memotivasi mereka untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai. Program sosialisasi yang efektif harus mempromosikan kesadaran akan peluang pekerjaan di sektor-sektor yang berkembang, termasuk sektor-sektor yang mungkin kurang populer di masyarakat. Ini dapat mencakup penyuluhan di sekolah-sekolah, lokakarya, dan program penyadaran melalui media sosial serta saluran komunikasi lainnya. Pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan perusahaan dan LSM untuk menyelenggarakan acara-acara yang memungkinkan para pemuda dan masyarakat umum untuk berinteraksi langsung dengan pemangku

kepentingan industri, menggali lebih dalam tentang peluang dan tantangan di sektor-sektor tersebut.

Sebagai upaya tambahan, pemangku kepentingan di Kabupaten Konawe memastikan bahwa infrastruktur pendidikan yang memadai tersedia di wilayah tersebut. Ini mencakup fasilitas pendidikan, aksesibilitas, dan penyediaan sarana pendukung, seperti perpustakaan dan laboratorium. Dalam rangka memungkinkan akses yang lebih baik ke pendidikan dan pelatihan, perlu ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan konektivitas yang memungkinkan para siswa dan pelatihan untuk mencapai tempat-tempat tersebut dengan mudah.

Selain itu, pendidikan sektor-sektor tertentu juga harus memperhatikan inklusi dan diversitas. Ini akan memastikan bahwa lulusan dari berbagai latar belakang dan kelompok sosial memiliki peluang yang sama untuk mengakses pelatihan sektor-sektor tertentu dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi Kabupaten Konawe. Ini bisa mencakup program beasiswa atau insentif bagi kelompok-kelompok yang kurang terwakili dalam sektor-sektor tertentu.

Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektoral melalui pendidikan dan sosialisasi juga harus diiringi dengan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah harus memantau efektivitas program pendidikan dan pelatihan serta program sosialisasi untuk memastikan bahwa mereka mencapai hasil yang diharapkan dan menyesuaikan

strategi jika diperlukan. Evaluasi berkala akan memungkinkan penyempurnaan berkelanjutan dalam upaya memerangi pengangguran. Kabupaten Konawe juga dapat mempertimbangkan pengembangan inkubator bisnis dan pusat inovasi untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang berkembang di sektor-sektor tertentu. Ini dapat memberikan lingkungan yang mendukung bagi perusahaan lokal, memungkinkan mereka untuk berinovasi, dan menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan. Pendukung keuangan, seperti bantuan start-up dan akses ke pembiayaan, juga dapat memberikan dorongan tambahan bagi wirausaha lokal untuk berkembang.

Selain itu, kolaborasi dengan organisasi nirlaba dan sektor swasta adalah langkah penting dalam memastikan keberlanjutan upaya penyerapan tenaga kerja sektoral. Perusahaan dan LSM dapat membantu dalam mendukung program pelatihan, menyediakan sumber daya keuangan, dan berpartisipasi dalam program sosialisasi. Ini menciptakan ekosistem yang kuat di mana pendidikan, pelatihan, dan upaya penyerapan tenaga kerja dapat bekerja secara bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama: mengurangi pengangguran dan meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Konawe.

Selain itu, program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan juga harus menjadi fokus. Kabupaten Konawe harus mempertimbangkan implikasi lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Ini akan membantu dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya berkelanjutan

secara ekonomi, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

Keterlibatan aktif masyarakat juga adalah faktor kunci dalam keberhasilan upaya ini. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif harus memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pelatihan, memotivasi anak-anak mereka untuk mengejar pendidikan yang sesuai, dan mengembangkan keterampilan yang relevan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang memengaruhi mereka secara langsung.

Seiring waktu, jika semua komponen ini terintegrasi dengan baik dan berfungsi secara sinergis, Kabupaten Konawe dapat mengalami perubahan signifikan dalam penurunan angka pengangguran. Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan sektor-sektor berkembang akan menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten, sementara sosialisasi yang efektif akan menginspirasi masyarakat untuk mengejar peluang di sektor-sektor ini. Ini, pada gilirannya, akan mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk Kabupaten Konawe secara keseluruhan.

17. *Peran Pemerintah*; Kebijakan pemerintah Kabupaten Konawe dapat berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Kebijakan yang mendukung investasi, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan sektor tertentu dapat membantu mengurangi pengangguran.

Pemerintah Kabupaten Konawe memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi isu penyerapan tenaga kerja dan pengangguran di wilayahnya. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat memiliki dampak besar pada kondisi ketenagakerjaan dan perekonomian lokal. Di bawah ini, kami akan menjelaskan secara luas dan mendalam berbagai aspek peran pemerintah dalam hal ini.

Pemerintah Kabupaten Konawe dapat berperan dalam mengundang investasi ke wilayah mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, seperti penyediaan infrastruktur dasar, fasilitas perizinan yang efisien, dan insentif pajak, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan sektor bisnis lokal. Hal ini akan menciptakan peluang kerja baru bagi penduduk setempat, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, pemerintah juga dapat memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang memiliki potensi untuk pertumbuhan. Ini mungkin termasuk sektor pertanian, pertambangan, industri, atau pariwisata, tergantung pada keunggulan dan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Konawe. Dengan mengalokasikan sumber daya dan dukungan khusus untuk sektor-sektor ini, pemerintah dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor yang berpotensi besar.

Pemerintah Kabupaten Konawe juga dapat mempromosikan pelatihan tenaga kerja yang relevan. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, serta dengan

perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Program pelatihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional, sehingga lulusan pelatihan tersebut memiliki keterampilan yang relevan dan berdaya saing.

Selanjutnya, dalam upaya mengurangi pengangguran, pemerintah perlu memonitor dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). UKM sering kali menjadi sumber penghasilan bagi banyak individu dan keluarga di daerah pedesaan. Dengan memberikan akses ke modal usaha, pelatihan wirausaha, dan bimbingan teknis, pemerintah dapat membantu meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas UKM, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi hubungan industrial serta melindungi hak-hak pekerja. Ini termasuk menjalankan peraturan ketenagakerjaan yang adil, upah minimum yang layak, dan lingkungan kerja yang aman. Dengan menciptakan kondisi kerja yang baik, pemerintah dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Selanjutnya, pemerintah juga dapat mempromosikan program kerja sama antara sektor swasta, publik, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program magang dan pemagangan. Program-program ini membantu pemuda mendapatkan pengalaman kerja yang berharga dan meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, ini juga membantu perusahaan dalam mencari bakat potensial untuk dipekerjakan secara permanen setelah program berakhir.

Pemerintah juga perlu memperhatikan isu-isu ketenagakerjaan seperti ketimpangan gender dan inklusi sosial. Mendorong kesetaraan gender dalam dunia kerja dan memberikan kesempatan kepada semua kelompok masyarakat, termasuk orang dengan disabilitas, untuk mengakses lapangan kerja, adalah tindakan yang penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

Dalam upaya mengurangi pengangguran, pemerintah perlu memperhatikan isu-isu pendidikan. Dengan memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta memastikan akses yang merata ke pendidikan tinggi dan pelatihan teknis, pemerintah dapat mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja.

Kebijakan fiskal dan moneter juga merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan pengangguran. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan kebijakan stimulus ekonomi dalam periode ketidakstabilan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja sementara dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah dapat mempromosikan inovasi dan teknologi melalui dukungan penelitian dan pengembangan. Ini dapat menciptakan lapangan kerja di sektor teknologi informasi dan sektor berbasis pengetahuan lainnya yang semakin penting dalam ekonomi global.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, pemerintah perlu mendukung program yang dapat meningkatkan keterampilan wirausaha dan akses

ke modal usaha. Ini dapat menciptakan pengusaha lokal yang dapat menghasilkan peluang kerja bagi diri mereka sendiri dan orang lain.

Pemerintah juga dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan memastikan ketidakstabilan ekonomi minimal, pemerintah dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk tetap beroperasi dan menghindari pemutusan hubungan kerja massif.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik juga penting. Dengan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan tidak terjadi korupsi, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial.

Terakhir, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional, untuk mencapai tujuan pengurangan pengangguran. Kolaborasi lintas sektor ini dapat membantu dalam menyusun dan melaksanakan program-program yang efektif dalam mengatasi isu ketenagakerjaan.

Kesimpulannya, peran pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sangat penting. Dalam rangka mencapai tujuan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam hal investasi, pelatihan tenaga kerja, pengembangan sektor ekonomi, perlindungan hak pekerja, dan berbagai aspek lain yang telah diuraikan. Dengan mengambil langkah-langkah ini,

pemerintah Kabupaten Konawe dapat berperan aktif dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

18. *Investasi Asing dan Penanaman Modal*; Investasi asing dan penanaman modal di Kabupaten Konawe dapat memengaruhi sektor-sektor tertentu. Penanaman modal yang signifikan dalam sektor tertentu dapat menciptakan lapangan kerja baru, sementara investasi yang menurun dapat memiliki efek sebaliknya.

Investasi asing dan penanaman modal merupakan dua elemen kunci dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah, termasuk Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kedua faktor ini memiliki potensi untuk memengaruhi sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, dan peran mereka sangat penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi peran investasi asing dan penanaman modal, serta dampaknya yang kompleks pada Kabupaten Konawe.

Investasi asing adalah aliran modal dari luar negeri yang masuk ke suatu negara atau wilayah dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis. Kabupaten Konawe, dengan potensi sumber daya alamnya, telah menjadi daya tarik bagi investor asing. Investasi asing dapat memainkan peran penting dalam sektor pertambangan dan perkebunan, yang merupakan sektor unggulan di wilayah ini. Keberadaan perusahaan tambang atau perusahaan perkebunan asing di Kabupaten Konawe dapat menciptakan peluang pekerjaan baru, terutama dalam pengeboran, pengolahan, dan distribusi sumber daya alam seperti

tambang nikel atau kelapa sawit. Namun, sumber daya alam yang dieksploitasi secara berlebihan dapat menyebabkan dampak lingkungan yang merusak, serta masalah sosial terkait dengan konflik lahan dan hak asasi manusia.

Selain investasi asing, penanaman modal domestik juga merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Konawe telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung penanaman modal dalam berbagai sektor, seperti industri, pertanian, dan pariwisata. Penanaman modal domestik dapat memicu pertumbuhan sektor manufaktur dan industri di wilayah ini. Ini menciptakan peluang pekerjaan dalam pembangunan pabrik, produksi, distribusi, dan layanan pendukung lainnya. Namun, penanaman modal domestik juga dapat terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal dan internal, seperti regulasi bisnis, peraturan lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi, yang dapat memengaruhi keputusan pengusaha untuk berinvestasi.

Penting untuk mengenali bahwa investasi asing dan penanaman modal domestik sering kali terkait erat. Investor asing sering bermitra dengan perusahaan lokal atau menjalin kemitraan strategis, yang dapat menghasilkan sinergi dalam pengembangan proyek-proyek besar. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Konawe harus mempertimbangkan peran dan kontribusi sektor swasta, baik lokal maupun asing, dalam merancang kebijakan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, dampak investasi asing dan penanaman modal tidak selalu positif. Selain menciptakan lapangan kerja, investasi asing dan penanaman

modal juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan. Pekerja sering kali berhadapan dengan kondisi kerja yang keras dan upah yang rendah, terutama dalam sektor-sektor berisiko tinggi seperti pertambangan. Pemerintah Kabupaten Konawe harus memastikan bahwa perusahaan asing dan lokal mematuhi standar kerja yang adil dan aman serta hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dampak investasi asing dan penanaman modal juga dapat memiliki konsekuensi terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Penambangan, misalnya, dapat menyebabkan degradasi lahan, kerusakan ekosistem, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan peraturan yang ketat dalam hal lingkungan dan keberlanjutan, serta mengawasi pelaksanaannya secara cermat.

Selain itu, dalam konteks Kabupaten Konawe, investasi asing dan penanaman modal juga dapat memengaruhi komunitas lokal dan masyarakat adat. Pemindahan lahan untuk proyek investasi bisa mengancam hak-hak tanah dan sumber daya tradisional masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta keberlanjutan budaya.

Pemerintah Kabupaten Konawe juga harus memperhatikan sektor lain yang dapat terpengaruh oleh investasi asing dan penanaman modal, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seharusnya mencakup pengembangan sumber daya manusia melalui investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Dalam

konteks ini, peran sektor swasta, termasuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di wilayah tersebut, dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan infrastruktur yang lebih luas.

Ketika membahas investasi asing dan penanaman modal di Kabupaten Konawe, penting juga untuk memperhitungkan aspek geopolitik dan hubungan internasional. Kedekatan dengan negara-negara tetangga dan hubungan bilateral dapat memengaruhi tingkat investasi asing. Kestabilan politik dan regulasi perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi keputusan investor asing.

Sebagai kesimpulan, investasi asing dan penanaman modal adalah dua faktor penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial Kabupaten Konawe. Mereka memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, dampaknya juga harus dikelola dengan bijak untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan kepentingan masyarakat lokal, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Konawe harus bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang mendukung investasi yang berkelanjutan, melindungi hak-hak masyarakat, dan mempromosikan pertumbuhan yang inklusif. Dengan pendekatan holistik ini, Kabupaten Konawe dapat memanfaatkan investasi asing dan penanaman modal sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

19. *Pertumbuhan Ekonomi Regional*: Pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah Kabupaten Konawe dapat membantu mengurangi ketimpangan dan tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi regional adalah suatu aspek penting dalam pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi yang merata terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Konawe, Indonesia. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang merata mengacu pada peningkatan produktivitas ekonomi dan pendapatan di seluruh wilayah tanpa adanya perbedaan yang signifikan antar daerah. Hal ini penting karena dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, sosial, dan tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

Kabupaten Konawe adalah wilayah dengan potensi ekonomi yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, hingga sektor jasa. Namun, seringkali pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tidak merata, dengan daerah-daerah tertentu mengalami pertumbuhan yang lebih lambat atau bahkan mengalami stagnasi. Ketidakmerataan ini dapat menghasilkan berbagai masalah, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, ketidaksetaraan pendapatan, dan ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah.

Salah satu langkah utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi regional yang merata adalah memahami potensi ekonomi yang ada di setiap daerah Kabupaten Konawe. Ini melibatkan identifikasi sektor ekonomi yang potensial dan pemanfaatan sumber daya lokal. Misalnya,

wilayah pesisir mungkin memiliki potensi dalam sektor perikanan dan pariwisata, sementara daerah pedalaman dapat fokus pada pertanian dan pertambangan. Dengan pendekatan ini, berbagai wilayah dapat mengembangkan keunggulan komparatif mereka sendiri dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, penting untuk mempromosikan investasi yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Konawe. Ini termasuk mendukung pengusaha lokal dan asing untuk berinvestasi di berbagai sektor dan daerah. Pemerintah setempat dapat memberikan insentif, fasilitas, dan dukungan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mempermudah investasi. Dengan mengencangkan investasi, potensi pertumbuhan ekonomi dapat dioptimalkan, dan pekerjaan baru dapat diciptakan, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Pendidikan dan pelatihan juga memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Dengan meningkatkan kualifikasi tenaga kerja lokal, mereka dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan sektor ekonomi yang sedang berkembang. Ini akan membantu mengurangi tingkat pengangguran struktural dan memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Semua pihak harus terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan kepentingan semua

wilayah. Keterlibatan aktif masyarakat lokal juga dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diakomodasi.

Selain itu, infrastruktur yang memadai adalah aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang merata. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi akan memudahkan transportasi barang dan orang, membuka akses ke pasar baru, dan mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi yang ada. Dengan infrastruktur yang baik, investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat merata di seluruh wilayah.

Dalam rangka mengurangi ketimpangan dan tingkat pengangguran, perlu ada kebijakan yang mendukung distribusi pendapatan yang lebih adil. Ini dapat mencakup pengenalan program kesejahteraan sosial, pembebasan pajak bagi sektor-sektor tertentu, atau pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan di daerah yang kurang berkembang. Kebijakan ini dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi regional yang merata, penting untuk memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan yang diadopsi secara teratur. Ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, dan memungkinkan penyesuaian strategi kebijakan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Pemantauan yang efektif juga dapat membantu dalam menyusun rencana pengembangan jangka panjang yang lebih efisien.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan isu lingkungan dalam upaya pertumbuhan ekonomi regional. Pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan harus menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi yang merata tidak merusak lingkungan alam dan sumber daya alam yang penting bagi keberlanjutan masa depan.

Selama proses pencapaian pertumbuhan ekonomi yang merata, komunikasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan sangat penting. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus terbuka terhadap masukan dan umpan balik dari masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, akan lebih mudah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam keseluruhan konteks, pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah Kabupaten Konawe bukan hanya tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan juga sarana untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, sosial, dan tingkat pengangguran. Ini adalah usaha kolaboratif yang memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga akademik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, Kabupaten Konawe dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata yang memberikan manfaat bagi semua warganya dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam hasil penelitian tentang analisis penyerapan tenaga kerja sektoral dan dampaknya terhadap angka pengangguran di Kabupaten Konawe merupakan hasil dari upaya penelitian yang menyeluruh. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu ketenagakerjaan dan pengangguran di wilayah tersebut. Berikut adalah kesimpulan dalam hasil penelitian secara rinci:

1. Penelitian ini membahas isu penyerapan tenaga kerja sektoral dan dampaknya terhadap angka pengangguran di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam analisis data kuantitatif, kami menemukan bahwa sektor ekonomi utama di kabupaten ini adalah pertanian, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyerapan tenaga kerja sektoral memiliki peran penting dalam mengurangi angka pengangguran di wilayah ini.
2. Sektor pertanian masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Konawe, meskipun sektor pertambangan dan konstruksi juga memberikan kontribusi yang signifikan. Penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor ini secara positif berkorelasi dengan penurunan angka pengangguran. Sebagai contoh, pertambangan dan konstruksi cenderung menyerap pekerja berpendidikan rendah, sementara sektor

perdagangan lebih bersifat inklusif dan dapat menyerap berbagai tingkat pendidikan.

3. Dampak penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap pengurangan pengangguran juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi lokal. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, kabupaten ini dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Namun, adanya fluktuasi harga komoditas seperti nikel dan dampak kebijakan peraturan ekstraksi tambang nikel, juga memengaruhi stabilitas penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan.
4. Selain itu, penelitian kualitatif ini secara mendalam melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk pekerja, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Wawancara tersebut mengungkapkan berbagai aspek sosial dan ekonomi yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa akses pendidikan yang terbatas, terutama di daerah pedesaan, menjadi kendala bagi pekerja untuk berpindah ke sektor yang lebih berkembang.
5. Faktor-faktor seperti perizinan usaha, ketersediaan pelatihan vokasional, dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam juga memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Pengusaha lokal menyoroti perlunya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal infrastruktur, perizinan usaha yang lebih efisien, dan insentif investasi yang lebih baik.

6. Dalam hal ini, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah Kabupaten Konawe. Disarankan bahwa pemerintah daerah harus fokus pada pengembangan sektor pertanian, pertambangan, dan konstruksi, sambil memperhatikan perlunya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas. Pendidikan dan pelatihan vokasional juga harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja lokal.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa penyerapan tenaga kerja sektoral memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Konawe, tetapi faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas juga berpengaruh. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal adalah kunci untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di wilayah ini. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari studi ini sangat penting untuk memandu langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Konawe dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral dan mengurangi angka pengangguran. Dalam konteks ini, kebijakan-kebijakan yang diusulkan harus luas, terperinci, dan mendalam, mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan yang relevan.

1. *Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan*: Kebijakan perlu difokuskan pada pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja lokal. Ini mencakup pelatihan keterampilan teknis dan non-teknis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
2. *Diversifikasi Ekonomi*: Untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, penting untuk merancang kebijakan yang mendorong diversifikasi ekonomi. Ini bisa mencakup insentif bagi pengusaha lokal untuk berinvestasi di sektor-sektor yang potensial, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
3. *Investasi Infrastruktur*: Infrastruktur yang baik adalah elemen penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan perlu mendukung investasi dalam infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi, yang akan membuka peluang baru dan membantu sektor-sektor ekonomi berkembang.
4. *Kemitraan Perguruan Tinggi dan Industri*: Membangun kerjasama antara perguruan tinggi dan industri adalah kunci dalam memastikan bahwa kurikulum pendidikan dan pelatihan mencerminkan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kebijakan harus mendorong kemitraan ini untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa.
5. *Program Pemberdayaan Masyarakat*: Untuk mengurangi angka pengangguran, program pemberdayaan masyarakat dapat membantu

dalam menciptakan lapangan kerja mandiri. Program-program seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha kecil, dan akses ke kredit dapat menjadi bagian dari strategi ini.

6. *Kebijakan Fiskal dan Insentif Pajak*: Kebijakan fiskal yang cerdas, seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja lokal atau insentif untuk berinvestasi di wilayah ini, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
7. *Program Magang dan Kerja Sama Industri*: Membangun program magang yang efektif dan kerja sama dengan industri dapat membantu pemuda memperoleh pengalaman kerja yang berharga dan mengurangi kesenjangan antara pendidikan dan pasar kerja.
8. *Pendidikan Berbasis Karir*: Kebijakan pendidikan harus diarahkan pada memberikan pendidikan berbasis karir yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ini mencakup pembaruan kurikulum sekolah dan perguruan tinggi untuk mencocokkan keterampilan yang dibutuhkan oleh sektor-sektor ekonomi lokal.
9. *Program Pelatihan Keterampilan Khusus*: Pemerintah daerah dan lembaga pelatihan harus menyediakan program pelatihan keterampilan khusus sesuai dengan potensi ekonomi wilayah, seperti pelatihan pertanian, nelayan, dan kerajinan lokal.
10. *Pembentukan Kooperasi Lokal*: Mendorong pembentukan koperasi lokal dalam sektor-sektor tertentu, seperti pertanian atau produksi kerajinan, dapat membantu para pekerja mengakses pasar lebih besar dan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik.

11. *Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan*: Diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk mengukur dampak kebijakan-kebijakan ini. Pemantauan berkelanjutan akan memungkinkan penyesuaian kebijakan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pasar tenaga kerja.
12. *Akses ke Pembiayaan*: Membantu pengusaha lokal, terutama yang berbasis di sektor-sektor mikro dan kecil, dalam mengakses pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan adalah bagian penting dari strategi kebijakan.
13. *Promosi Investasi*: Membangun program promosi investasi yang efektif untuk menarik investasi swasta ke Kabupaten Konawe, dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan, akan menciptakan peluang kerja.
14. *Pendampingan dan Bimbingan*: Membentuk program pendampingan dan bimbingan bagi pekerja dan pengusaha, terutama di sektor-sektor yang masih berkembang, untuk membantu mereka dalam mengatasi hambatan dan meningkatkan produktivitas.
15. *Keterlibatan Pemuda dan Wanita*: Kebijakan harus memperhatikan keterlibatan pemuda dan wanita dalam pasar tenaga kerja dengan menyediakan peluang dan dukungan yang setara.

Rekomendasi kebijakan ini harus disusun dalam kerangka kerja yang komprehensif dan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan unik Kabupaten Konawe. Langkah-langkah ini, jika diimplementasikan dengan baik, diharapkan dapat membantu mengatasi isu

pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral di wilayah tersebut, membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, Achmad Zaky. 2019. *Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Informal, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
- Dumairy. 1996, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta. Erlangga
- Gatiningsih, Eko Sutrisno. 2017. *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Jatinangor - Sumedang
- Gilarso. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Kanisius. Yogyakarta
- Haryo, K. 2002, *Stabilitas Penyerapan Tenaga Kerja*, Jakarta. Media Ekonomi,
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/6025/5301>
<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/2402/contents>
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20150320-101549-8349.pdf>
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_180582.pdf
https://satudata.kemnaker.go.id/satudatapublic/2022/04/files/publikasi/1650295641100_2021%2520%2520Buku%2520Perkiraan%2520Kebutuhan%2520TK_Sektor_Jabatan%25202021_2024.pdf
<https://pustakadata.semarangkota.go.id/upload/pdf/450-penyusunan-nspk-petunjuk-pelaksanaan-dan-petunjuk-teknis-penyelenggaraan-statistik-sektoral-kota-semarang.pdf>
- Jhingan, M.L, 2004, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Terjemahan oleh D. Guritno, Edisi ke-1, Cetakan ke-10, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- ILO, 2012. *Profil Pekerjaan yang Layak INDONESIA*
- Milles, B. Matthew dan Huberman, Michael, A. 1988, *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Terjemahan, UI-Press. Jakarta

- Mulyadi, 2006, *Akuntansi Manajemen*. Edisi ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi S, 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Murti, Sumarni. John Suprihanto, 2014. *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan* Yogyakarta : Liberty.
- Simanjuntak, Payaman. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta:LP-FEUI.
- Soesastro, H, dkk. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir* . Jilid I (1945-1959)
- Sudarsono dkk, 1988. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Krunia Jakarta, Universitas Terbuka Jakarta.
- Sukirno, Sadono.1994. *Pengantar Ekonomi Makro*. PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M.Tohar. 2000. *Membuka Usaha Kecil*. Jakarat: Kanisius.

LAMPIRAN: DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Dokumen Presentasi Seminar Awal



Gambar 2. Peserta Seminar Awal



Gambar 3. Pengumpulan Data dengan Pelaku Usaha



Gambar 4. Wawancara dengan Kadis Disnaker Kab. Konawe



Gambar 5. Wawancara dengan Camat Unaaha



Gambar 6. Wawancara Pencari Kerja di Kec. Morosi



Gambar 7. Presentasi Seminar Akhir



Gambar 8. Peserta Seminar Akhir